



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan Arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasi keberadaan Arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan baik Unit Pengolah maupun Unit Kearsipan khususnya Arsip Substantif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu mengatur pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip Substantif;
  - b. bahwa Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: B-PK.02.09/141/2018, hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Kabupaten Balangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanahumbu dan kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang pemusnahan Arsip;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Jadwal Retensi Arsip;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Derah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG JADWAL  
RETENSI ARSIP SUBSTANTIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Balangan yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan serta Desa.
7. Dinas Kearsipan adalah Dinas yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan Kearsipan.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Balangan.
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Balangan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kecamatan adalah Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Balangan.
13. Pemerintahan Desa adalah Desa yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Balangan.
14. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip
15. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi



- kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kegiatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
16. Arsip Dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi.
  17. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
  18. Arsip Inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun.
  19. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
  20. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
  21. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
  22. Unit Kearsipan adalah unit yang melaksanakan pengelolaan Arsip Inaktif, dalam hal ini dilaksanakan oleh bagian tata usaha/Sekretariat di SKPD.
  23. Unit Pengolah adalah unit yang melaksanakan pengelolaan Arsip Aktif, dalam hal ini dilaksanakan oleh masing-masing bidang/bagian di SKPD.
  24. Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
  25. Retensi Arsip adalah Jangka Waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
  26. Arsip substantif adalah arsip yang berkaitan dengan bidang substansial, antara lain pemerintahan, politik, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan dan pendidikan.
  27. Arsip keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan keuangan/fiskal yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
  28. Retensi Arsip Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip diunit pengolah untuk mendukung pelaksanaan dan tugas dan fungsi.
  29. Retensi Arsip Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip diunit kearsipan sampai dengan dimusnahkan atau diserahkan ke Dinas Kearsipan.
  30. Keterangan Musnah adalah informasi yang menyatakan bahwa jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka penyimpanannya sudah habis dan tidak memiliki nilai guna, tidak ada peraturan perundang-



undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus yang masih dalam proses hukum.

31. Keterangan Permanen adalah informasi yang menyatakan bahwa jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Dinas Kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional sesuai dengan lingkup fungsi dan tugas masing-masing organisasi.
32. Pedoman Retensi Arsip adalah ketentuan dalam bentuk petunjuk yang memuat retensi minimal arsip masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi acuan dalam penyusunan JRA masing-masing Perangkat Daerah.
33. Series adalah himpunan arsip yang tercipta, yang diatur dan dikelola sebagai suatu entitas informasi karena adanya keterkaitan secara fungsional, kegiatan dan kesamaan subyek.
34. Berkas adalah himpunan arsip yang disatukan karena memiliki keterkaitan dalam suatu konteks pelaksanaan kegiatan dan memiliki kesamaan jenis dan kesamaan masalah.
35. Isi Berkas adalah arsip yang merupakan informasi
36. Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan.
37. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
38. Pemindahan Arsip Inaktif adalah kegiatan pengurangan arsip inaktif dan pengalihan tanggung jawab pengelolaan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan.
39. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip yang tidak bernilai guna dan pengamanan informasi yang dilakukan dengan cara penghancuran fisik arsip sampai tidak dapat dikenali lagi.
40. Penyerahan Arsip statis adalah kegiatan pengurangan arsip dan pengalihan tanggung jawab pengelolaan arsip statis dari setiap pencipta arsip kepada lembaga kearsipan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif dan sebagai bahan pertanggungjawaban.

## BAB II JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

### Pasal 2

Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah menganut azas sentralisasi dalam kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan.

### Pasal 3

- (1) Penerapan JRA Substantif sebagai sarana penilaian Arsip dan penyusutan Arsip.
- (2) Penerapan JRA Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.



- (3) Penerapan JRA Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TATA CARA PENGGUNAAN JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

#### Pasal 4

JRA Substantif dapat dipergunakan sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman untuk masa simpan Arsip;
- b. sebagai rekomendasi tentang penetapan jenis Arsip dimusnahkan, atau dipermanenkan; dan
- c. sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.

#### Pasal 5

Rekomendasi yang berisi masa simpan Arsip yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tidak bersifat mutlak dan dapat diperpanjang masa simpan Arsip oleh Unit Pengolah.

### BAB IV PENYUSUTAN ARSIP

#### Pasal 6

Penyusutan Arsip meliputi :

- a. pemindahan Arsip Inaktif Substantif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
- b. pemusnahan Arsip Substantif yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penyerahan Arsip Statis Substantif oleh pencipta Arsip dan Unit Pengolah Arsip dimasing-masing SKPD kepada Dinas Kearsipan.

#### Bagian Kesatu Pemindahan Arsip Inaktif Substantif

#### Pasal 7

Pemindahan Arsip Inaktif Substantif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pemindahan Arsip Substantif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan dalam lingkungan SKPD; dan
- b. pemindahan Arsip Substantif dari SKPD ke Depot arsip Dinas Kearsipan untuk Arsip yang memiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

#### Pasal 8

- (1) Pemindahan Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:



- a. pemeriksaan Arsip;
  - b. pendaftaran Arsip;
  - c. penataan Arsip;
  - d. pelaksanaan pemindahan Arsip; dan
  - e. berita acara pemindahan Arsip dan daftar Arsip.
- (2) Pemeriksaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan seleksi terhadap Arsip Aktif yang dimiliki oleh Unit Pengolah untuk mengetahui Arsip tersebut sudah memasuki masa inaktif atau belum, dengan cara mencocokkan tahun penciptaan Arsip dengan retensi aktif yang tercantum dalam JRA.
  - (3) Pendaftaran Arsip sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan mencatat Arsip hasil seleksi kedalam formulir daftar Arsip yang dipindahkan sesuai dengan penataan Arsip yang masih aktif.
  - (4) Penataan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mencantumkan nomor urut pada folder disudut kiri atas sesuai daftar Arsip dan memasukkan Arsip beserta foldernya kedalam kotak Arsip.
  - (5) Pelaksanaan pemindahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menyerahkan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan yang disertai dengan berita acara pemindahan dan daftar Arsip yang dipindahkan.

#### Pasal 9

Unit Pengolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali memindahkan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan.

#### Pasal 10

Pemindahan Arsip Substantif dari instansi ke lembaga kearsipan untuk Arsip yang dimiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dinas Kearsipan.

#### Bagian Kedua

Pemusnahan Arsip Substantif yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna

#### Pasal 11

Pemusnahan Arsip Substantif yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak memiliki nilai guna;
- b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
- c. tidak ada peraturan perundang-undangan; dan
- d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.



## Pasal 12

- (1) Pemusnahan Arsip Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. pemeriksaan Arsip;
  - b. pendaftaran Arsip;
  - c. pengajuan usul musnah;
  - d. pelaksanaan pemusnahan Arsip; dan
  - e. pembuatan berita acara pemusnahan Arsip.
- (2) Pemeriksaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan seleksi terhadap Arsip yang telah habis retensinya dan dinyatakan musnah serta tidak terkait dengan Arsip lain untuk dibuatkan daftar.
- (3) Pendaftaran Arsip sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan mencatat Arsip dalam formulir daftar Arsip usul musnah.
- (4) Pengajuan usul musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan membuat surat pengajuan usul musnah Arsip kepada kepala SKPD, ANRI dan Bupati dengan melampirkan daftar usul musnah.
- (5) Pelaksanaan pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memusnahkan Arsip secara total baik secara fisik maupun informasi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang pejabat dari bagian hukum sekretariat Daerah dan bidang pengawasan Daerah.
- (6) Pembuatan berita acara pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

## Pasal 13

Pemusnahan Arsip Substantif di Unit Kearsipan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.

Bagian Ketiga  
Penyerahan Arsip Statis Substantif

## Pasal 14

- (1) Penyerahan Arsip Statis Substantif oleh pencipta Arsip dan Unit Pengolah Arsip pada setiap SKPD kepada Dinas Kearsipan, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. pemeriksaan Arsip;
  - b. penilaian Arsip;
  - c. pengelompokkan Arsip;
  - d. pendaftaran Arsip;



- e. penataan Arsip;
  - f. pelaksanaan penyerahan; dan
  - g. pembuatan berita acara serah terima arsip statis.
- (2) Pemeriksaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melihat keterangan akhir permanen dikolom keterangan JRA.
  - (3) Penilaian Arsip sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengevaluasi Arsip dari aspek substansi informasi, fungsi dan karakteristik fisik serta menentukan menganalisa/mengkaji kembali apakah Arsip-arsip tersebut benar-benar dinyatakan telah tidak operasional namun masih memiliki nilai guna bagi kepentingan pertanggungjawaban nasional.
  - (4) Pengelompokan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengelompokkan Arsip yang telah diteliti berdasarkan jenis/seri Arsip.
  - (5) Pendaftaran Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mencatat Arsip hasil seleksi kedalam formulir daftar Arsip yang diserahkan.
  - (6) Penataan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan memasukkan Arsip beserta foldernya kedalam kotak Arsip dan memberi label sesuai dengan isi kotak, dan sebelum folder dimasukkan, terlebih dahulu dicantumkan nomor urut pada folder di sudut kiri atas sesuai daftar Arsip.
  - (7) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan menyerahkan Arsip Statis ke Dinas Kearsipan disertai dengan berita acara serah terima Arsip Statis dan daftar Arsip yang diserahkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Dinas Kearsipan.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Substanif dan Keuangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 26 Maret 2019



BUPATI BALANGAN,

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 26 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN  
**PERATURAN BUPATI BALANGAN**  
**NOMOR..... TAHUN 2019**  
**TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

**JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SUBSTANTIF**

Urusan Pertanian, Perdagangan, Perhubungan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pendidikan dan Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komunikasi dan Informatika, Hukum, Ketengakerjaan dan Transmigrasi, Perencanaan dan Pembangunan, Perpustakaan, Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sosial, Pemerintah Daerah dan Kearsipan

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF (RETENSI)	IN-AKTIF	
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERTANIAN</b>			
1	Kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan, Hortikultura, Sarana Prasarana	5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 tahun	Permanen
	a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan			
	b. Penyediaan Bahan			
	c. Perumusan Kebijakan			
	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan			
	e. Penetapan berbentuk NSPK			
2	<b>PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>			
	Perbituan Ternakan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	a. Produksi Bibit Ternak Ruminansia			
	- Produksi bibit ternak Ruminansia Besar			
	- Produksi bibit ternak Ruminansia Kecil			
	b. Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Produksi Bibit ternak unggas			
	- Produksi bibit Aneka Ternak			

1	2	3	4	5
e Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian Bibit Ternak</li> <li>- Pelepasan Bibit Ternak</li> </ul>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen	
d Mutu Bibit ternak <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikasi Bibit Ternak</li> <li>- Pengawasan Mutu Bibit Ternak</li> </ul>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen	
e Pengembangan Bibit Ternak <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Pengembangan Bibit Ternak</li> <li>- Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak</li> </ul>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
f Sifat Kelembagaan & Persewaan Pemasukan/Pengeluaran	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
Pakan Ternak	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
a Bahan Pakan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan Pakan Asal Hewan</li> <li>- Bahan Pakan Asal Tumbuhan</li> </ul>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
b Pakan Hijauan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budidaya Pakan Hijauan</li> <li>- Kawasan Pengembangan dan Integrasi Ternak</li> </ul>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	
c Pakan olahan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi Pakan Olahan</li> <li>- Pengolahan Pangan</li> </ul>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah	

1	2	3	4	5
d	<p>Mutu Pakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikasi Pakan</li> <li>- Pengawasan Pakan</li> </ul> <p>Surat Rekomendasi &amp; Persetujuan Pemakuan/Pengeluaran</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<p>Budidaya Ternak</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
a	<p>Ternak Potong</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ternak Sapi dan Kerbau Potong</li> <li>- Ternak Kambing dan Domba Potong;</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
b.	<p>Budidaya Ternak Perah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ternak Sapi dan Kerbau Perah</li> <li>- Ternak Kambing Perah</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
c	<p>Ternak Unggas dan Aneka Ternak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ternak Unggas</li> <li>- Aneka Ternak dan Monogastrik</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
d	<p>Usaha dan Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan masyarakat/ lembaga (LM3)</li> <li>- Sarjana Membangun Desa (SMD)</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
Kesehatan Hewan	<p>a Pengamatan Penyakit Hewan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner</li> <li>- Penyiakan Penyakit Hewan</li> </ul> <p>b Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan Penyakit Hewan</li> <li>- Pemberantasan Penyakit Hewan</li> <li>- Rekomendasi MIBM</li> </ul> <p>c Perlindungan Hewan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Risiko Penyakit Eksotik</li> <li>- Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan</li> <li>- Kembangkan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan</li> </ul> <p>d Ketambagaan kesehatan Hewan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber Daya Kesehatan Hewan</li> <li>- Laporan THL</li> <li>- Proposal Poskewan</li> </ul> <p>e Pengawasan Obat Hewan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mutu Obat Hewan</li> <li>- Peredaran Obat Hewan</li> <li>- Pendaftaran Obat Hewan</li> <li>- Rekomendasi Obat Hewan</li> </ul> <p>Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapameran</p> <p>a Pascapameran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi Pascapameran</li> <li>- Sarana Pascapameran</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>b Higien Sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan Hygiene Sanitasi</li> <li>- Inspeksi Hygiene Sanitasi</li> </ul> <p>c Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Sanitary</li> <li>- Pengawasan Keamanan Produk Hewan</li> </ul> <p>d Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zoonosis</li> <li>- Kesejahteraan Hewan</li> </ul> <p>e Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengujian Produk Hewan:</li> <li>- Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan</li> </ul> <p>f Surat Rekomendasi &amp; Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
3	<p>PERKERUNAN</p> <p>Tanaman Semusim</p> <p>a Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim</li> <li>- Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>b Perbenihan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim</li> <li>- Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim</li> </ul> <p>c Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim</li> <li>- Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim</li> </ul> <p>d Pemberdayaan dan Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan Tanaman Semusim</li> <li>- Kelembagaan Tanaman Semusim</li> </ul> <p>Tanaman Rempah &amp; Penyegar</p> <p>a Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah &amp; Penyegar</li> <li>- Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah &amp; Penyegar</li> </ul> <p>b Perbenihan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan Perbenihan Tanaman Rempah &amp; Penyegar</li> <li>- Bimbingan Peredaran Tanaman Rempah &amp; Penyegar</li> </ul> <p>c Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah &amp; Penyegar</li> <li>- Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah &amp; Penyegar</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<p>d Pembedayaan dan Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembedayaan Tanaman Rempah &amp; Penyegar</li> <li>- Kelembagaan Tanaman Rempah &amp; Penyegar</li> </ul> <p>Tanaman Tahunan</p> <p>a Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunan</li> <li>- Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan</li> </ul> <p>b Perberihan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan Perberihan Tanaman Tahunan</li> <li>- Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan</li> </ul> <p>c Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan</li> <li>- Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan</li> </ul> <p>d Pembedayaan dan Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembedayaan Tanaman Tahunan</li> <li>- Kelembagaan Tanaman Tahunan</li> </ul> <p>Perlindungan Perkebunan</p> <p>a Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim</li> <li>- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>	

1	2	3	4	5
1	<p>b Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar</li> <li>- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar</li> </ul> <p>c Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan</li> <li>- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan</li> </ul> <p>d Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak Perubahan Iklim</li> <li>- Pencegahan Kebakaran</li> </ul> <p>Pascapanen dan Pembinaan Usaha</p> <p>a Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar</li> <li>- Penerapan Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar</li> </ul> <p>b Pascapanen Tanaman Tahunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi Pascapanen Tanaman Tahunan</li> <li>- Penerapan Pascapanen Tanaman Tahunan</li> </ul> <p>c Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan Usaha Perkebunan</li> <li>- Perkebunan Berkelanjutan</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<p>d. Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangguan Usaha Perkebunan</li> <li>- Penanganan Konflik</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	
<p>4. HORTIKULTURA</p> <p>1. Perlindungan hortikultura</p> <p>a. Perlindungan Tanaman Buah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi Perlindungan Tanaman Buah</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	
<p>b. Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	
<p>c. Perlindungan Tanaman Florikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Florikultura</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5
	<p>d Dampak iklim dan Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Dampak iklim dan Lingkungan</li> <li>- Informasi dan Persyaratan Teknis</li> </ul> <p>Perbenihan Hortikultura</p> <p>a Penilaian Varietas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penilaian Varietas</li> <li>- Bahan Penyusunan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penilaian Varietas</li> <li>- Bahan Penyusunan Bahan Pelaksanaan Teknis di Bidang Penilaian Varietas</li> <li>- Bahan Penyusunan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penilaian Varietas</li> <li>- Bahan Penyusunan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Penilaian Varietas</li> <li>- Bahan Penyusunan Bahan Evaluasi di Bidang Penilaian Varietas</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan Tugas Kedinesan lain berdasarkan penguasaan pimpinan baik lisan maupun tertulis</li> <li>- Bahan Penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan</li> <li>- Bahan Penyajian dan pemeliharaan dokumen seksi Penilaian Varietas</li> <li>b. Pengawasan Mutu Benih               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan Penyipan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi pengawasan mutu benih Hortikultura</li> <li>- Bahan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura</li> <li>- Bahan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura</li> </ul> </li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, Prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikultura</li> <li>- Bahan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikultura</li> <li>- Bahan Penyiapan bahan evaluasi di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikultura</li> <li>- Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Tahun</li> <li>2 Tahun</li> <li>2 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> </ul>
5	<p>Budidaya dan Pascapanen Florikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong</li> <li>- Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap</li> <li>- Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong</li> <li>- Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap</li> </ul> <p><b>PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perluasan dan Pengelolaan Lahan</li> <li>a. Basis Data Lahan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Lahan</li> <li>- Analisis dan Penyajian Data Lahan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permanen</li> </ul>

1	2	3	4	5
b Pengendalian Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi dan Analisis Lahan</li> <li>- Rekomendasi Teknik pengendalian lahan</li> </ul> <p>c Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.</li> <li>- Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.</li> </ul> <p>d Perluasan Kawasan Tanaman Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan.</li> <li>- Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan.</li> </ul> <p>e Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan.</li> <li>- Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan.</li> </ul>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
Pengelolaan Air Irigasi	a Pengembangan Sumber Air	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Air Permukaan</li> <li>- Air Tanah</li> </ul>			
	b Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Jaringan</li> <li>- Optimasi Air</li> </ul>			

1	2	3	4	5
1	<p>c. Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iklim</li> <li>- Konservasi Air dan Lingkungan Hidup</li> </ul> <p>d. Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Kelembagaan</li> <li>- Pengembangan Kelembagaan</li> </ul> <p>Pembayaan Pertanian</p> <p>a. Pembayaan Program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dan Informasi pembiayaan program</li> <li>- Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program</li> </ul> <p>b. Pembayaan Syariah dan Kerja Sama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaan Syariah</li> <li>- Kerja Sama pembiayaan</li> </ul> <p>c. Pembayaan Agrribisnis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi dan Verifikasi pembiayaan agrribisnis</li> <li>- Fasilitas dan Pemantauan pembiayaan agrribisnis</li> </ul> <p>d. Kelembagaan dan Pemberdayaan Agrribisnis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan Agrribisnis</li> <li>- Pemberdayaan Agrribisnis</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
1	<p>Pupuk Pestisida</p> <p>a Pupuk Organik dan Pembenhah Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan</li> <li>- Hortikultura dan Perkebunan</li> </ul> <p>b Pupuk Anorganik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan</li> <li>- Hortikultura dan Perkebunan</li> </ul> <p>c Pestisida</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pestisida Kimia</li> <li>- Pestisida Hayati</li> </ul> <p>d Pengawasan Pupuk dan Pestisida</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Pupuk</li> <li>- Pengawasan Pestisida</li> </ul> <p>Alat dan Mesin Pertanian</p> <p>e Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Perkebunan dan Peternakan</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>b Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Perkebunan dan Peternakan</li> </ul> <p>c Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan</li> <li>- Pelayanan</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
6	<p>TANAMAN PANGAN</p> <p>Perbaikan Tanaman Pangan</p> <p>a Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian Varietas</li> <li>- Pengawasan Mutu Benih</li> </ul> <p>b Produksi Benih Serealia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padi</li> <li>- Serealia Non Padi</li> </ul> <p>c Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aneka Kacang</li> <li>- Aneka Umbi</li> </ul> <p>d Kelembagaan Benih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan Produksi</li> <li>- Kelembagaan Pengawasan</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
Budidaya Serealia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Padi Irigasi dan Rawa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padi Irigasi</li> <li>- Padi Rawa</li> </ul> </li> <li>b Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padi Tadah Hujan</li> <li>- Padi Lahan Kering</li> </ul> </li> <li>c Jagung               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensifikasi Jagung</li> <li>- Pengembangan Jagung</li> </ul> </li> <li>d Serealia Lain               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensifikasi Serealia Lain</li> <li>- Pengembangan Serealia Lain</li> </ul> </li> </ul> <p>Budidaya Aneka Kacang dan Umbi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Kedelai               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensifikasi Kedelai</li> <li>- Pengembangan Kedelai</li> </ul> </li> <li>b Ubi Kayu               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensifikasi Ubi Kayu</li> <li>- Pengembangan Ubi Kayu</li> </ul> </li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
c	<p>Aneka Kacang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensifikasi Aneka Kacang</li> <li>- Pengembangan Aneka Kacang</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
d	<p>Aneka Umbi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensifikasi Aneka Umbi</li> <li>- Pengembangan Aneka Umbi</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
	<p>Perlindungan Tanaman Pangan</p>			
a	<p>Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan</li> <li>- Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan.</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah data diperbarui</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
b	<p>Dampak Perubahan Iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptasi</li> <li>- Mitigasi dampak perubahan iklim</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
e	<p>Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi teknologi pengendalian.</li> <li>- Verifikasi teknologi pengendalian.</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
d	<p>Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan</li> <li>- Kelengkapan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
Pasca panen Tanaman Pangan	a Padi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi pascapanen padi.</li> <li>- Sarana pascapanen padi.</li> </ul>			
	b Jagung dan Serealia Lain	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi pascapanen jagung dan serealia lain.</li> <li>- Sarana pascapanen jagung dan serealia lain.</li> </ul>			
	c Kedelai dan Aneka Kacang	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang.</li> <li>- Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang.</li> </ul>			
	d Aneka Umbi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi pascapanen aneka umbi.</li> <li>- Sarana pascapanen aneka umbi.</li> </ul>			
7	<b>PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN</b> <b>Pengolahan Hasil Pertanian</b>			
	a Tanaman Pangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Serealia</li> <li>- Aneka Kacang dan Aneka Umbi</li> </ul>			
	b Hortikultura	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Buah dan Sayuran</li> <li>- Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat</li> </ul>			

1	2	3	4	5
<p>c Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Semusim</li> <li>- Tanaman Tahunan</li> </ul> <p>d Peternakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruminansia</li> <li>- Non Ruminansia</li> </ul> <p>Mutu dan Standardisasi</p> <p>a Standardisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Perkebunan dan Peternakan</li> </ul> <p>b Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Perkebunan dan Peternakan</li> </ul> <p>c Akreditasi dan Kelayakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Perkebunan dan Peternakan</li> </ul> <p>d Kerjasama dan Harmonisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Perkebunan dan Peternakan</li> </ul>		<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<p>Pengembangan Usaha dan Investasi</p> <p>a Kemitraan dan Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemitraan</li> <li>- Kelembagaan dan Ekonomi Kreatif</li> </ul> <p>b Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Perkebunan dan Peternakan</li> </ul> <p>c Promosi Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya Saing</li> <li>- Ekspansi dan Ekspo</li> </ul> <p>d Promosi Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya Saing</li> <li>- Ekspansi dan Ekspo</li> </ul> <p>Pemasaran Domestik</p> <p>a Informasi Pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Pasar</li> <li>- Deseminasi Informasi Pasar</li> </ul>		<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<p>b Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan Pasar</li> <li>- Stabilisasi Harga</li> </ul> <p>c Sarana dan Ketersediaan Pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Pasar</li> <li>- Ketersediaan Pasar</li> </ul> <p>d Jaringan Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses Pasar</li> <li>- Sarana Pemasaran</li> </ul> <p>Pemasaran Internasional</p> <p>a Analisis dan Pengembangan Ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Ekspor</li> <li>- Pengembangan Ekspor</li> </ul> <p>b Pemasaran Bilateral</p> <p>c Pemasaran Regional dan Multilateral</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regional</li> <li>- Multilateral</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>	

1	2	3	4	5
8	<p>d Kerjasama Komoditi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama Komoditi Regional</li> <li>- Kerjasama Komoditi Multilateral dan Bilateral</li> </ul> <p><b>PENELITIAN , PENGKAJIAN ,DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN</b></p> <p>1 Administrasi meliputi :</p> <p>Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat</p> <p>2 Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan</p> <p>a. Hasil Penelitian dan Pengembangan</p> <p>b. Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi</p> <p>3 Diseminasi</p> <p>4 Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian</p> <p>a. Pameran, Temu Lapangan, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p> <p>5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>b. Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya</p> <p>5 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan</p> <p>6 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan</p> <p>7 Data Penelitian dan Pengembangan</p> <p>8 Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan</p> <p>9 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)</p> <p>a. Hak Cipta</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>b. Hak Paten Sederhana</p> <p>c. Hak Paten Biasa</p> <p>d. Hak Merek</p> <p>e. Pendaftaran Varietas Tanaman</p> <p>f. Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim</p> <p>g. Permohonan Hak PVTT Tanaman Tahunan</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>h. Permeobonan HMI yang diotak</p> <p>Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan</p> <p>Data Penelitian dan Pengembangan</p> <p><b>KETAHANAN PANGAN</b> Ketersediaan dan Kerawanan Pangan</p> <p>a Ketersediaan Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Ketersediaan Pangan</li> <li>- Sumberdaya Pangan</li> </ul> <p>b Akses Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Akses Pangan</li> <li>- Pengembangan Akses Pangan</li> </ul> <p>c Kerawanan Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Kerawanan Pangan</li> <li>- Penanggulangan Kerawanan Pangan</li> </ul> <p>Distribusi dan Cadangan Pangan</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
a. Distribusi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Distribusi Pangan</li> <li>- Jelembagaan Distribusi Pangan</li> </ul>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
b. Harga Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Harga Pangan Produsen</li> <li>- Analisis Harga Pangan Konsumen</li> </ul>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
c. Cadangan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadangan Pangan Pemerintah</li> <li>- Cadangan Pangan Masyarakat</li> </ul>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
Pengonekarragaman Konsumsi dan Kelahunan Pangan	a. Konsumsi Pangan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
b. Pengonekarragaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pola Konsumsi Pangan</li> <li>- Kebutuhan Konsumsi Pangan</li> </ul>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
- Pengembangan Pangan Lokal	- Promosi Pengonekarragaman Pangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Mustah

1	2	3	4	5
c	Keamanan Pangan Segar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Pengawasan Keamanan Pangan Segar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	- kelenyagaan Keamanan Pangan Segar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	a. Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	b. Dewan Ketahanan Pangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	c. SOLID	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	d. Penghargaan Ketahanan Pangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
10	KARANTINA PERTANIAN	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	Data Karantina	3 Tahun setelah data diperbarui	2 Tahun	Permanen
	a. Data karantina Hewan	3 Tahun setelah data diperbarui	2 Tahun	Permanen
	(1) Data Penyakit Hewan	3 Tahun setelah data diperbarui	2 Tahun	Permanen
	(2) Teknik dan Metode	3 Tahun setelah data diperbarui	2 Tahun	Musnah
	(3) Data Kualitatif dan Kuantitatif	3 Tahun setelah data diperbarui	2 Tahun	Permanen
	(4) Laporan	3 Tahun setelah data diperbarui	2 Tahun	Permanen
	(5) Data Sarana/ Laboratorium/ Lokasi	3 Tahun setelah data diperbarui	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
b	Data Karantina Tumbuhan (1) Data Penyakit Tumbuhan (2) Teknik dan Metode (3) Data Kualitatif dan Kuantitatif (4) Laporan (5) Data Sarana/Laboratorium/Lokasi  Inventarisasi Penyakit a Inventarisasi Penyakit Hewan (1) Survei (2) Determinasi Penyakit/Daerah Pencar (3) pengamatan Penyakit di laboratorium/kandang uji diagnosa  b Inventarisasi Penyakit Tumbuhan	3 Tahun setelah data diperbarui 3 Tahun setelah data diperbarui 3 Tahun setelah data diperbarui 3 Tahun setelah data diperbarui 3 Tahun setelah data diperbarui 3 Tahun setelah data diperbarui 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen

1	2	3	4	5
<p>(1) Survei</p> <p>(2) Determinasi Penyakit / Daerah Pencar</p> <p>(3) pengamatan Penyakit di laboratorium /kandang uji diagnosa</p> <p>Tindakan Karantina</p> <p>a Tindakan Karantina Hewan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemeriksaan</li> <li>(2) Pengasingan</li> <li>(3) Pengamatan</li> <li>(4) Perlakuan</li> <li>(5) Penahanan</li> <li>(6) Penolakan</li> <li>(7) Pemusnahan</li> <li>(8) Pembebasan</li> </ol> <p>b Tindakan Karantina Tumbuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemeriksaan</li> <li>(2) Pengasingan</li> <li>(3) Pengamatan</li> <li>(4) Perlakuan</li> <li>(5) Penahanan</li> <li>(6) Penolakan</li> <li>(7) Pemusnahan</li> <li>(8) Pembebasan</li> </ol>	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5
1	<p>Sertifikasi Pelepasan Karantina</p> <p>a Sertifikasi Pelepasan Karantina Hewan b Sertifikasi Pelepasan Karantina Tumbuhan</p> <p>Pemberantasan Penyakit</p> <p>a Pemberantasan Penyakit Hewan (1) Penutupan Satu Daerah (2) Pembatasan Gerak HPHK (3) Pembinaan HPHK</p> <p>b Pemberantasan Penyakit Tumbuhan (1) Penutupan Satu Daerah (2) Pembatasan Gerak OPTK (3) Pembinaan OPTK</p> <p>Keamanan Pangan</p> <p>a Pengawasan Keamanan PSAH (Pangan Segar Asal Hewan) b Pengawasan Keamanan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)</p> <p>Tertib Operasional</p> <p>a Tertib Operasional Karantina Hewan (1) Penelitian Data Laporan Operasional (2) Polisi Khusus/Keterlibatan (PPNS)</p>	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
b	<p>Tertib Operasional Karantina Tumbuhan</p> <p>(1) Penelitian Data Laporan Operasional</p> <p>(2) Polisi Khusus/Keterliban (PPNS)</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
11	<p>PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN</p> <p>Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman</p> <p>a Permooban Perlindungan Varietas Tanaman</p> <p>b Pengujian Perlindungan Varietas Tanaman</p> <p>c Pendaftaran Varietas Sumber Daya Genetik Tanaman</p> <p>Pelayanan Perijinan Pertanian</p> <p>a Sarana I ( bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian )</p> <p>b Sarana II ( bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan )</p> <p>c Sarana III ( bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak )</p> <p>Pelayanan Hukum</p> <p>a Sertifikasi</p>	<p>10 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>15 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
a	<p>Sertifikasi</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
12	b. Pertimbangan Hukum  BIMBINGAN TEKNIS	10 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	15 Tahun  2 Tahun	Permanen  Musnah
13	EVALUASI	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
<b>II</b>	<b>SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERDAGANGAN</b>			
1	<b>KEBLAKKAN</b> Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi dan perlindungan konsumen, Perdagangan Luar Negeri, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor Nasional.  a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyajian bahan c. Perumus Kebijakan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk NSPK f. perumusan dan penerapan standar	5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	<b>PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b> Bina Usaha  a. Kelembagaan dan penguatan usaha  Kelembagaan Penguatan usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
<p>b. Jasa Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan berbasis elektronik</li> <li>- Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis.</li> </ul> <p>c. Usaha dagang asing dan keagenan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaha dagang asing</li> <li>- Keagenan</li> </ul> <p>d. Informasi perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran perusahaan</li> <li>- Seksi analisa LKTP</li> </ul> <p>e. Pelaku pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggerak</li> <li>- Pemangsa</li> </ul> <p>Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri</p> <p>a. Iklim usaha dan bimbingan teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iklim usaha</li> <li>- Bimbingan teknis</li> </ul> <p>b. Fasilitas usaha dan pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas usaha produktif</li> <li>- Pemasaran</li> </ul>		<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<p>c. pengembangan produk lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelaahan potensi produk</li> <li>- Fasilitasi penguatan produk</li> </ul> <p>d. peoctraan produk dalam negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri</li> <li>- peningkatan promosi</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	
<p>Logistik dan Sarana Distribusi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	
<p>a. Pengembangan sarana distribusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> <li>- Bimbingan teknis pengembangan</li> </ul> <p>b. Pengelolaan sarana distribusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan teknis pengelolaan</li> <li>- Evaluasi pengelolaan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	
<p>c. kerja sama pengembangan sistem logistik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah</li> <li>- Lembaga non pemerintah</li> </ul> <p>d. Informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi logistik</li> <li>- Bimbingan teknis penyedia jasa logistik</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5
<p>Bahan Pokok dan Barang Strategis</p> <p>a. Informasi Pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi harga <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan</li> <li>- Pengolahan data</li> <li>- Penyajian</li> <li>- Penyajian informasi</li> <li>- Analisis</li> </ul> </li> <li>- Informasi non harga <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan</li> <li>- Pengolahan data</li> <li>- Penyajian</li> <li>- Penyajian informasi</li> <li>- Analisis</li> </ul> </li> </ul> <p>b. Hasil industri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gula dan tepung</li> <li>- Minyak goreng dan garam</li> </ul> <p>c. Barang strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil agro</li> <li>- Hasil industri</li> </ul> <p>d. Bahan pokok agro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serealia</li> <li>- Hewan dan non serealia</li> </ul>	<p>STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</p> <p>Standardisasi</p>	<p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<p>a. kelembagaan dan informasi standar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan kelembagaan</li> <li>- Informasi standar</li> </ul> <p>b. kerjasama standarisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kerjasama regional</li> <li>- kerjasama bilateral dan multilateral</li> </ul> <p>c. Perumusan dan Penerapan Standar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan Standar</li> <li>- Perumusan Standar</li> </ul> <p>d. Tata Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepegawaian</li> <li>- Keuangan</li> <li>- Perencanaan dan Program</li> <li>- Inventaris Kantor</li> </ul> <p>Pemberdayaan Konsumen</p> <p>a. kerjasama, informasi, dan publikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kerja sama</li> <li>- informasi dan publikasi</li> </ul> <p>b. analisa penyelenggara perlindungan konsumen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konsultasi hukum</li> <li>- analisis</li> </ul>		<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
<p>c. bimbingan konsumen dan pelaku usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bimbingan konsumen</li> <li>- bimbingan pelaku usaha</li> </ul> <p>d. fasilitasi kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat</li> <li>- pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen</li> </ul> <p>Pengawasan Barang Beredar dan Jasa</p> <p>a. produk pertambangan dan aneka industri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- produk pertambangan dan olahan</li> <li>- produk aneka industri</li> </ul> <p>b. produk pertanian, kimia, dan kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- produk pertanian dan kehutanan</li> <li>- produk kimia dan olahan</li> </ul> <p>c. jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jasa distribusi</li> <li>- jasa bisnis</li> </ul> <p>d. kerjasama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kerja sama baik lembaga pemerintah dan non pemerintah</li> </ul>	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	
<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>		
<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>		
<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>		

1	2	3	4	5
4	<p>PERDAGANGAN BERLANGKA KOMODITI</p> <p>Perniagaan</p> <p>a. Bina Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan dan pelaku penunjang pelaku pasar</li> </ul> <p>b. Pengawasan Transaksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan dan pelaku penunjang</li> <li>- Pelaku pasar</li> </ul> <p>c. Pengawasan keuangan dan audit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan dan evaluasi keuangan</li> <li>- Audit kepatuhan dan keuangan</li> </ul> <p>Analisis Pasar</p> <p>a. Pengkajian pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian pasar fisik dan peryerahan</li> <li>- Posisi dan pelaporan</li> </ul> <p>b. Pengembangan pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan dan produk</li> <li>- Tata tertib dan kontrak</li> </ul> <p>c. Sistem informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi informasi</li> <li>- Data</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
1	Pasar Fisik dan Jasa  a. Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang  - Pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang - Pembinaan pelaku sistem resi gudang  b. Pengawasan pasar lelang  - Pengawasan transaksi - Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang  c. Pengawasan sistem resi gudang  - Pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi - Pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
6	EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
5	BIMBINGAN TEKNIS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
III	<b>SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERHUBUNGAN</b>			
1	<b>KEBIJAKAN</b> Kebijakan mengenai Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, dan Perkerataapian :  1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
<p>4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>5. Penetapan dalam bentuk NSPK</p> <p><b>PERHUBUNGAN DARAT</b></p> <p>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>1 Jaringan Transportasi Jalan :</p> <p>a Jaringan Prasarana dan Pelayanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang</li> <li>- penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C</li> <li>- penetapan lokasi terminal barang utama</li> <li>- standar pelayanan minimal pengoperasian terminal</li> <li>- jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi</li> <li>- jaringan lintas pada jaringan jalan primer</li> <li>- penetapan kelas jalan primer</li> <li>- kualifikasi teknis petugas terminal</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5
<p>4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan transportasi jalan sekunder</li> </ul> <p>b Pengembangan Transportasi Jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan</li> <li>- pengembangan transportasi jalan</li> </ul> <p>2 Sarana Angkutan Jalan</p> <p>a Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor</li> <li>- sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor</li> <li>- sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor</li> <li>- akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor</li> </ul> <p>b Teknologi Kendaraan Bermotor :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor</li> <li>- persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor</li> <li>- harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>	
<p>3 Laju lintas jalan</p> <p>a Manajemen dan Rekayasa Laju Lintas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan</li> <li>- manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>	
<p>b Perlempangan Jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman teknis perlempangan jalan</li> <li>- penimbangan kendaraan bermotor di jalan</li> <li>- akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>	

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor</li> <li>- pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional</li> </ul> <p>4 Angkutan jalan</p> <p>a Angkutan Penumpang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tarif angkutan penumpang kelas ekonomi</li> <li>- izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara</li> <li>- izin trayek antar kota antar provinsi</li> <li>- izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara &amp; antar kota/ provinsi</li> <li>- penilaian kinerja perusahaan angkutan umum</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemberian subsidi angkutan umum</li> <li>- angkutan perintis</li> <li>- pengibangan perusahaan angkutan umum</li> </ul> <p>b. Angkutan Barang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan</li> <li>- tarif angkutan barang</li> <li>- izin operasi angkutan barang tertentu</li> <li>- pembinaan angkutan barang</li> </ul> <p>5. Pengendalian operasioanl</p> <p>a. Monitoring Operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan</p> <p>b. Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman Teknis</li> <li>- penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</li> </ul> <p>Bimtek PPNS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguasaan pengetahuan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</li> </ul> <p>Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>1 Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a Analisa dan Evaluasi Jaringan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan</li> <li>- Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, &amp; penyeberangan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>b Pengembangan Jaringan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)</li> <li>- pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan</li> </ul> <p>2. Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>a Rancang Bangun Sarana :</p> <p>b Bimbingan Perawatan Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan</li> <li>- pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan</li> </ul> <p>3. Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a Rancang Bangun Pelabuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan</li> <li>- pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>- rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional</p> <p>b. Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan</li> <li>- kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan</li> </ul> <p>4. Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a. Manajemen Lalu Lintas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manajemen lalu lintas</li> <li>- tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan</li> <li>- Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai &amp; danau</li> <li>- sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau</li> </ul> <p>b. Alur dan Perubahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penggerakan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau</li> <li>- perambuan sungai, danau dan penyeberangan</li> </ul> <p>5 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a Bimbingan Usaha Angkutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan</li> <li>- persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional</li> </ul> <p>b Tarif dan Keperintisan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan</li> <li>- kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>Bina Sistem Transportasi Perkotaan</p> <p>1 Jaringan Transportasi Perkotaan</p> <p>a Jaringan Transportasi Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan</li> <li>- transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi</li> <li>- Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan</li> </ul> <p>2 Lalu Lintas Perkotaan</p> <p>a Lalu Lintas Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan</li> <li>- manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan</li> <li>- manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan</li> <li>- pengaturan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah</li> </ul> <p>3 Angkutan Perkotaan</p> <p>a Angkutan Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek</li> <li>- jaringan trayek perkotaan</li> <li>- penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi</li> </ul> <p>4 Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan</p> <p>a Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang</li> <li>- pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi</li> <li>- penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi</li> </ul> <p>5 Dampak Transportasi Perkotaan</p> <p>a Dampak Transportasi Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- pertanggung jawaban dampak transportasi di kawasan perkotaan</li> <li>- masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan</li> <li>- pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota</li> <li>- rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan</li> <li>- Masterplan transportasi perkotaan</li> </ul> <p>Keselamatan Transportasi Darat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Manajemen Keselamatan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a Monitoring dan Evaluasi :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoring dan evaluasi data kecelakaan</li> <li>- kualifikasi unit pengkajian</li> <li>- pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, surgati, danau dan penyeberangan</li> </ul> </li> <li>b Pengembangan Keselamatan :</li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Tahun</li> <li>8 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musnah</li> <li>Permahan</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Permahan</li> </ul>

1	2	3	4	5
<p>program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- harmonisasi kebijakan</li> </ul> <p>2. Promosi dan Kermitraan Keselamatan</p> <p>a. Promosi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promosi keselamatan</li> </ul> <p>b. Kermitraan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kerjasama keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan</li> </ul> <p>3. Bina Keselamatan Angkutan Umum</p> <p>a. Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum :</p> <p>b. Keselamatan Awak Angkutan Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5
1	<p>4 Audit dan Inspeksi Keselamatan</p> <p>a Audit Keselamatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia</li> <li>- identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, darau dan penyeberangan</li> <li>- audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, darau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan</li> </ul> <p>b Inspeksi Keselamatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman keselamatan</li> <li>- Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, darau dan penyeberangan</li> <li>- Investigasi kecelakaan sungai, darau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
IV	<b>SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PENANAMAN MODAL</b>			
1	<p><b>KEBIJAKAN</b></p> <p>Kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Kerja Sama Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi:</p>	<p>3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
1	<p>a. Pengkajian dan Penguatan Kebijakan</p> <p>b. Penyajian Kebijakan</p> <p>c. Perumusan Kebijakan</p> <p>d. Masukan dan Dukungan Kebijakan</p> <p>e. Penerimaan NSPK</p>			
2	<p><b>PERENCANAAN PENANAMAN MODAL</b></p> <p>A. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya</p> <p>1) Agribisnis</p> <p>a) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan</p> <p>b) Kelautan, Perikanan dan Peternakan</p> <p>2) Energi</p> <p>a) Energi Terbarukan</p> <p>b) Energi Tak Terbarukan</p> <p>3) Sumber Daya Mineral</p> <p>a) Mineral Logam</p> <p>b) Mineral Non Logam</p> <p>B. Perencanaan Industri Manufaktur</p> <p>1) Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka</p> <p>a) Industri Logam dan Mesin</p> <p>b) Industri Tekstil dan Aneka</p> <p>2) Industri Kimia</p> <p>a) Industri Kimia Dasar</p> <p>b) Industri Barang Kimia dan Farmasi</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
1	<p>3) Industri Alat Transportasi dan Telekomika</p> <p>a) Industri Alat Transportasi b) Industri Telekomika</p> <p>C. Perencanaan Jasa dan Kawasan</p> <p>1) Jasa Perdagangan dan Pariwisata</p> <p>a) Jasa Perdagangan b) Jasa Pariwisata</p> <p>2) Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya</p> <p>a) Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan b) Jasa Lainnya</p> <p>3) Kawasan Ekonomi</p> <p>a) Kawasan Ekonomi Khusus b) Kawasan Ekonomi Lainnya</p> <p>D. Perencanaan Infrastruktur</p> <p>1) Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan</p> <p>a) Infrastruktur Transportasi Darat b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>2) Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air</p> <p>a) Infrastruktur Energi b) Infrastruktur Sumber Daya Air</p> <p>3) Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya</p> <p>a) Infrastruktur Transportasi laut b) Infrastruktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
3	<p>PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</p> <p>A. Deregulasi Penanaman Modal</p> <p>1) Sektor Primer</p> <p>a) Pertanian, Kelautan dan Perikanan b) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan</p> <p>2) Sektor Sekunder</p> <p>a) Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telekomatika b) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka</p> <p>3) Sektor Tersier</p> <p>a) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi b) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya</p>	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
1	<p>B. Pengembangan Potensi Daerah</p> <p>1) Sektor Primer dan Tersier</p> <p>a) Sektor Primer b) Sektor Tersier</p> <p>2) Sektor Sekunder</p> <p>a) Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telekomatika b) Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka</p> <p>C. Pemberdayaan Usaha</p> <p>1) Pembinaan dan Penyuluhan</p> <p>a) Pembinaan b) Penyuluhan</p> <p>2) Kemitraan Usaha</p> <p>a) Sektor Primer dan Tersier b) Sektor Sekunder</p> <p>3) Pelayanan Usaha</p> <p>a) Sektor Primer dan Tersier b) Sektor Sekunder</p>	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
4	<p>PROMOSI PENANAMAN MODAL.</p> <p>A. Pengembangan Promosi</p> <p>1) Analisis Strategi Promosi</p> <p>a) Analisis Target Promosi b) Analisis Daya Saing Promosi</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>2) Fasilitas Promosi Luar Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Wilayah Amerika dan Eropa</li> <li>b) Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika</li> </ol> <p>B. Promosi Sektoral</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Industri Sumber Daya Alam</li> <li>b) Jasa dan Kawasan</li> </ol> </li> <li>2) Promosi Industri Manufaktur <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik</li> <li>b) Industri Manufaktur Lainnya</li> </ol> </li> <li>3) Promosi Infrastruktur <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan</li> <li>b) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya</li> </ol> </li> </ol> <p>C. Fasilitas Promosi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wilayah Kalimantan</li> </ol> <p>D. Pameran dan Sarana Promosi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pameran 5 Tahun Musnah <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyusunan Program dan Monitoring</li> <li>b) Penyelenggaraan dan Evaluasi</li> </ol> </li> <li>2) Media Cetak <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Materi Promosi</li> <li>b) Publikasi dan Distribusi</li> </ol> </li> </ol>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
5	<p>3) Media Elektronik</p> <p>a) Materi Promosi b) Pelayanan Informasi</p> <p>KERJA SAMA PENANAMAN MODAL.</p> <p>A. Kerja Sama Bilateral dan Multilateral C. Kerja Sama Dunia Usaha Internasional</p> <p>1) Asosiasi dan Lembaga Bisnis</p> <p>a) Asosiasi Bisnis b) Lembaga Bisnis</p> <p>2) Lembaga Keuangan</p> <p>a) Lembaga Perbankan b) Lembaga Non Perbankan</p> <p>PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p> <p>A. Pelayanan Aplikasi</p> <p>1) Aplikasi Sektor Primer dan Tersier</p> <p>a) Aplikasi Baru b) Aplikasi Perluasan c) Aplikasi Perubahan</p> <p>2) Aplikasi Sektor Sekunder</p> <p>a) Aplikasi Baru b) Aplikasi Perluasan c) Aplikasi Perubahan</p> <p>E. Pelayanan Perizinan</p> <p>1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier</p> <p>a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana b) Kelutamaan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
6	<p>PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p> <p>A. Pelayanan Aplikasi</p> <p>1) Aplikasi Sektor Primer dan Tersier</p> <p>a) Aplikasi Baru b) Aplikasi Perluasan c) Aplikasi Perubahan</p> <p>2) Aplikasi Sektor Sekunder</p> <p>a) Aplikasi Baru b) Aplikasi Perluasan c) Aplikasi Perubahan</p> <p>E. Pelayanan Perizinan</p> <p>1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier</p> <p>a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana b) Kelutamaan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa</p>	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
<p>2) Perizinan Sektor Sekunder</p> <p>a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam b) Industri Kimia dan Barang Kimia c) Industri Aneka</p> <p>C. Pelayanan Fasilitas</p> <p>1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier</p> <p>a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa</p> <p>2) Perizinan Sektor Sekunder</p> <p>a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam b) Industri Kimia dan Barang Kimia c) Industri Aneka</p>		<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>7</p> <p>PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.</p> <p>A. Penanaman Penanaman Modal</p> <p>B. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal</p> <p>C. Fasilitas Penyelesaian Masalah</p> <p>D. Pengawasan Penanaman Modal</p> <p>E. Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal</p>		<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	F. Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan.	2 Tahun	Permanen
<b>V</b>	<b>SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			
1	KEBIJAKAN  Kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, pengelolaan B3, limbah B3, dan sampah, pematihan hukum lingkungan, komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas  a. Pengkajian dan pengusunan kebijakan: - Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah - Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor - Kajian Dampak Lingkungan - Pengembangan Perangkat Kebijakan b. Penyediaan bahan c. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan d. Pengumpulan dan pengolahan data e. penetapan dalam bentuk nspk	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	TATA LINGKUNGAN  A. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1) Inventarisasi, penetapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan a) Dokumentasi Inventarisasi b) Pedoman Inventarisasi c) Penetapan Ekoregion d) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPPLH) Nasional e) Pedoman Penyusunan RPPPLH Provinsi, RPPPLH Kabupaten/Kota 2) Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam a) Evaluasi pemanfaatan dan perpadangan sumber daya alam b) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam  B. Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor 1) Evaluasi Penerapan 2) Perencanaan Lingkungan Hidup	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
1	<p>C. Ekonomi Lingkungan</p> <p>1) Perencanaan</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Valuasi Ekonomi</p> <p style="padding-left: 40px;">b) Internalisasi Lingkungan</p> <p>2) Insentif dan Pendanaan Lingkungan</p> <p>D. Dampak Lingkungan</p> <p>1) Bimtek Dampak Lingkungan</p> <p>2) Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Penilaian dokumen lingkungan</p> <p style="padding-left: 40px;">b) Pemeriksaan dokumen lingkungan</p> <p>3) Evaluasi dan Tindak Lanjut</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Evaluasi</p> <p style="padding-left: 40px;">b) Tindak Lanjut</p> <p>3</p> <p>PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN</p> <p>A. Pemantauan dan Pengawasan</p> <p style="padding-left: 20px;">1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Industri Kimia</p> <p style="padding-left: 40px;">b) Industri Logam, Elektronika dan Mesin</p> <p style="padding-left: 40px;">c) Aneka Industri</p> <p style="padding-left: 40px;">d) Prasarana dan Jasa</p> <p style="padding-left: 20px;">2) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas</p> <p style="padding-left: 20px;">3) Agro Industri dan Usaha Skala Kecil</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
<p>1</p> <p>a) Peternakan dan Perikanan  b) Perkebunan  c) Kehutanan dan Hortikultura  d) Usaha Skala Kecil</p> <p>4) Udara Sumber Bergerak  a) Transportasi Air dan Udara  b) Transportasi Darat  c) Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat</p> <p>B. Evaluasi dan Pengembangan  1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa  a) Industri Kimia  b) Industri Logam, Elektronika dan Mesin  c) Aneka Industri  d) Prasarana dan Jasa</p> <p>2) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas  3) Agro Industri dan Usaha Skala kecil  a) Peternakan dan Perikanan  b) Perkebunan  c) Kehutanan dan Hortikultura  d) Usaha Skala Kecil</p> <p>4) Udara Sumber Bergerak  a) Transportasi Air dan Udara  b) Transportasi Darat  c) Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat</p> <p>4</p> <p>PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM  A. Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan  1) Pengembangan  a) Sumber Daya Genetik  b) Keamanan Hayati</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
<p>2) Pemanfaatan</p> <p>a) Sumber Daya Genetik</p> <p>3) Pengelolaan Sumber Daya Genetik</p> <p>a) Pengembangan dan Pemanfaatan</p> <p>b) Pemantauan dan Pengawasan</p> <p>4) Keamanan Hayati</p> <p>a) Pengembangan dan Pengelolaan</p> <p>b) Pemantauan dan Pengawasan</p> <p>5) Pengendalian Kerusakan Lahan</p> <p>a) Lahan Buddha</p> <p>b) Lahan Non Buddha</p> <p>B. Kerusakan Ekosistem Perairan Darat</p> <p>1) Kerusakan Ekosistem</p> <p>a) Sungai</p> <p>b) Kerusakan Ekosistem</p> <p>c) Pengelolaan Kualitas Air</p> <p>2) Danau</p> <p>a) Pengendalian Kerusakan Ekosistem</p> <p>b) Pengelolaan Kualitas Air</p> <p>3) Rawa</p> <p>a) Rawa gambut</p> <p>b) Rawa bukan gambut</p> <p>C. Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut</p> <p>1) Pencegahan</p> <p>2) Penanggulangan</p> <p>3) Pemulihan</p>		<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
1	<p>2 Perpejakaan Perpejakaan Koperasi Perpejakaan UKM</p> <p>3 Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank e Pembiayaan dan Penjaminan Kredit</p> <p>1 Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Sewa Guna Usaha dan Anak Putang</p> <p>2 Penjaminan Kredit Penjaminan Asuransi Kredit</p> <p>3 Pasar Modal Obligasi Modal Penyerahan</p> <p>1 Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)</p>	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
6	<p>Pemasaran dan Jaringan Usaha</p> <p>a Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>1 Pengadaan Pengadaan Sektor Formal Pengadaan Sektor Informal</p> <p>2 Distribusi Distribusi Sektor Formal Distribusi Sektor Informal</p> <p>3 Pengembangan Pengembangan Sektor Formal Pengembangan Sektor Informal</p> <p>b Ekspor dan Impor 5 Tahun Permanen</p> <p>1 Ekspor Ekspor Kopernasi Ekspor UKM</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
<p>2 Impor Impor Koperasi Impor UKM</p> <p>3 Hubungan Perdagangan Internasional Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional Hubungan Perdagangan Bilateral</p> <p>c Sarana dan Prasarana Pemasaran</p> <p>1 Sarana Pengembangan Pasar Tradisional Pengembangan Sentra Pemasaran</p> <p>2 Prasarana Lembaga Perantara Fasilitasi HAKI</p> <p>3 Pengembangan Potensi Pemasaran Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi</p> <p>d Kemiripan dan Jaringan Usaha</p> <p>1 Kemiripan Kemiripan Koperasi Kemiripan UKM</p> <p>2 Jaringan Usaha Jaringan Usaha Koperasi Jaringan Usaha UKM</p> <p>3 Pengembangan Kerja sama Kelembagaan Pengembangan Kerja sama Kelembagaan Koperasi Pengembangan Kerja sama Kelembagaan UKM</p> <p>e Informasi dan Publikasi Bisnis</p> <p>1 Pengumpulan Informasi Pengumpulan informasi Koperasi Pengumpulan informasi UKM</p> <p>2 Pengolahan Informasi Pengolahan informasi Koperasi Pengolahan informasi UKM</p> <p>3 Publikasi dan Promosi Publikasi dan Promosi Koperasi Publikasi dan Promosi UKM</p>		<p>2 Tahun setelah proses kegiatan divyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan divyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan divyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<p>7 Lembaga Layanan Pemassaran LLP Koperasi dan UKM</p> <p>Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>a Pengembangan Kewirausahaan</p> <p>1 Lembaga Kewirausahaan</p> <p>Pengembangan Jaringan Kewirausahaan</p> <p>Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan</p> <p>2 Penumbuhan Kewirausahaan</p> <p>Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan</p> <p>Evaluasi Kewirausahaan</p> <p>3 Sosialisasi Kewirausahaan</p> <p>Perangkat Lunak</p> <p>Promosi Kewirausahaan</p> <p>b Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM</p> <p>1 Diklat Formal dan Informal</p> <p>Diklat Formal</p> <p>2 Diklat Non Formal</p> <p>Perangkat Lunak</p> <p>Sarana dan Prasarana Diklat</p> <p>3 Kerjasama Lembaga Diklat</p> <p>Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah</p> <p>Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah</p> <p>c Peran Serta Masyarakat</p> <p>1 Peningkatan dukungan media Massa terhadap Koperasi &amp; UKM</p> <p>Peningkatan dukungan media Massa terhadap Koperasi</p> <p>Peningkatan dukungan media Massa terhadap UKM</p> <p>2 Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM</p> <p>Peningkatan dukungan LSM terhadap Koperasi</p> <p>Peningkatan dukungan LSM terhadap UKM</p> <p>3 Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi</p> <p>Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi</p> <p>dukungan Organisasi Profesi terhadap Koperasi</p> <p>dukungan Organisasi Profesi terhadap UKM</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5
<p>d Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperrasi dan UKM</p> <p>1 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperrasi dan UKM Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperrasi dan Evaluasi Diklat UKM</p> <p>2 Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal</p> <p>3 Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Non Pemerintah</p> <p>e Advokasi</p> <p>1 Advokasi Organisasi dan Manajemen Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperrasi dan UKM Advokasi Organisasi</p> <p>2 Advokasi Kemitraan dan Teknologi Advokasi Kemitraan Advokasi Teknologi</p> <p>3 Advokasi Peraturan Perundang-Undangan Kajian Penerapan Sosialisasi Perundang-Undangan</p> <p>8 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha a Produktifitas dan Mutu</p> <p>1 Produktifitas Inkubator Teknologi Pengembangan Klaster</p> <p>2 Peningkatan Mutu Disain Standarisasi</p> <p>3 Sertifikasi Produk Sertifikasi Label dan Merek</p> <p>b Restrukturisasi Usaha</p> <p>1 Restrukturisasi Manajemen Manajemen Koperrasi Manajemen UKM</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5
1	<p>2 Restrukturisasi Pendanaan Pendanaan Koperasi Pendanaan UKM</p> <p>3 Restrukturisasi Kelembagaan Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi Restrukturisasi Kelembagaan UKM</p> <p>c Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) 1 Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) Asosiasi dan Manajemen LPB Akreditasi LPB</p> <p>2 Pengembangan Bisnis LPB Peningkatan Kerja sama LPB Kerja sama Layanan LPB</p> <p>3 Pengembangan Jaringan LPB Kerja sama Kelembagaan LPB Kerja sama Sarana dan Teknologi</p> <p>d Fasilitasi Investasi KUKM</p> <p>1 Investasi Klaster KUKM Fasilitasi Investasi KUKM Agro Bisnis</p> <p>2 Fasilitasi Investasi KUKM Non Agro Bisnis Pengembangan Pangan Pengembangan Non Pangan</p> <p>3 Fasilitas Investasi Aneka Usaha KUKM Fasilitasi Investasi Usaha Koperasi Fasilitasi Investasi Usaha UKM</p> <p>e Pengembangan Sistem Bisnis 1 Fasilitasi Transaksi dalam Negeri Luar Negeri</p> <p>2 Kerja Sama Usaha Pertukaran Koperasi Pertukaran UKM</p> <p>3 Jaringan Komunikasi Bisnis Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis Komunikasi Bisnis</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
9	<p><b>Pengkajian Sumber Daya KUKM</b></p> <p><b>a Penelitian Koperasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan</li> <li>2 Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan</li> <li>3 Tata Laksana Penelitian</li> </ol> <p><b>b Penelitian UKM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan</li> <li>2 Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan</li> <li>3 Tata Laksana Penelitian</li> </ol> <p><b>c Penelitian Sumber Daya</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan</li> <li>2 Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan</li> <li>3 Tata Laksana Penelitian</li> </ol> <p><b>d Pengembangan Perkaderan UKM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyuluhan</li> <li>2 Perkaderan</li> </ol>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
<p>10</p> <p>Pengembangan 3 Kerja Sama dan Jaringan Lembaga Pemerintah Lembaga Non Pemerintah</p> <p>Kerja Sama Internasional dan Hubungan Antar Lembaga</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	
<p><b>VIII SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b></p>				
<p>1</p> <p><b>KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN</b></p> <p>1 Kebijakan tentang pendidikan dan kebudayaan meliputi: kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, menengah, atas, dan pendidikan tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian dan pengusunan Kebijakan</li> <li>- Penyediaan bahan</li> <li>- Perumusan Kebijakan</li> <li>- Pemberian masukan dan dukungan dalam Penyusunan Kebijakan</li> <li>- Penetapan dalam bentuk NSPK</li> <li>- Perumusan dan penerapan standar</li> </ul> <p>2 MoU (Memorandum of Understanding )</p>	<p>3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>	
<p>2</p> <p><b>KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian dan pengusunan Penetapan</li> <li>- Penyediaan bahan</li> <li>- Perumusan Penetapan</li> <li>- Pemberian masukan dan dukungan dalam Penyusunan Penetapan</li> <li>- Penetapan dalam bentuk Keputusan</li> </ul>	<p>3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	
<p>3</p> <p><b>PEMBINAAN PENDIDIKAN</b></p> <p>A Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal</p> <p>1 Paud a Bahan ajar</p>				

1	2	3	4	5
	<p>Alat permainan edukatif</p> <p>b Pelatihan</p> <p>c Block Grant</p> <p>d Sosialisasi</p> <p>e Peringatan hari anak nasional</p> <p>2 Pendidikan masyarakat</p> <p>a Penyelenggaraan program</p> <p>  bahan ajar</p> <p>  Penyusunan majalah</p> <p>b Pemberian bantuan sosial</p> <p>  Penilaian proposal</p> <p>  Pemberian barisan</p> <p>c Pembinaan program</p> <p>  Temu koordinasi</p> <p>  Bantek program / pendampingan</p> <p>  Peningkatan kapasitas kelembagaan</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>d Lomba, penghargaan, dan anugerah</p> <p>e Peringatan hari anak internasional</p> <p>f Pameran/publikasi/sosialisasi</p> <p>3 Kursus dan pelatihan</p> <p>a Penyelenggaraan program</p> <p>Uji kompetensi (akreditasi)</p> <p>Penilaian dan Penetapan kinerja Lembaga kursus dan pelatihan (LKPI)</p> <p>Pendataan Lembaga kursus dan pelatihan</p> <p>Penguatan kerja sama dengan Lembaga/mitra</p> <p>b Pemberian bantuan sosial</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
<p>B Pendidikan dasar</p> <p>1 Sekolah dasar</p> <p>a Kurikulum</p> <p>b Bahan ajar</p> <p>c Pelatihan</p> <p>d Block grant</p> <p>e Bimbingan teknis/sosialisasi</p> <p>f Lomba, sayembara, dan festival</p> <p>g Bantuan operasional sekolah (BOS)</p> <p>h Bantuan siswa miskin</p>		<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>2 Sekolah menengah pertama</p> <p>a Kurikulum</p> <p>b Bahan ajar</p> <p>c Pelatihan</p> <p>d Block grant</p> <p>e Bimbingan teknis/ sosialisasi</p> <p>f Lomba, sayembara, dan festival</p> <p>g Bantuan operasional sekolah (BOS)</p> <p>h Bantuan siswa miskin</p> <p>3 Pendidikan khusus-layanan khusus/ PK-LK</p> <p>a Bahan ajar</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
<p>- Bimbingan teknis/sosialisasi</p> <p>- Lomba, sayembara, festival, gelbyar, dan jambore</p> <p>4 Pendidik dan tenaga pendidik</p> <p>a Pendataan dan pemetaan</p> <p>b Pembinaan guru dan tenaga pendidik</p> <p>c Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)</p> <p>d Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah</p> <p>e Penghargaan guru dan tenaga kependidikan</p> <p>f Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan</p> <p>g Block grant</p> <p>h Bimbingan teknis/ sosialisasi</p>	<p>4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5
4	<p><b>KEBUDAYAAN</b></p> <p>A Pelestarian cagar budaya dan permutsewaan</p> <p>1 Registrasi musium</p> <p>a Pendaftaran dan penetapan</p> <p>b Pengelolaan data</p> <p>2 Peindungan</p> <p>a Perizinan dan pengamanan</p> <p>b Pemeliharaan dan penugaran</p> <p>3 Pengembangan dan pemanfaatan</p> <p>a Pengembangan</p> <p>b Pemanfaatan</p> <p>4 Eksplorasi dan dokumentasi</p> <p>a Eksplorasi cagar budaya</p> <p>b Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum</p>	<p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
1	<p>D. Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer</p> <p>1) Perangkat Mitigasi</p> <p>2) Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca</p> <p>a) Laporan inventarisasi GRK nasional</p> <p>b) Data bidang inventarisasi GRK</p> <p>3) Pengendalian Bahan Perusak Ozon</p> <p>a) Surat rekomendasi kepada importir terdaftar dan bahan perusak ozon</p> <p>b) Hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan lapisan ozon</p> <p>4) Pengendalian kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahar</p> <p>E. Adaptasi Perubahan Iklim</p> <p>1) Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim</p> <p>a) Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim</p> <p>b) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim</p> <p>2) Kerentanan Perubahan Iklim</p> <p>a) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim</p> <p>b) Media kliring kerentanan perubahan iklim</p>	<p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
5	<p>PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH</p> <p>A. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun</p>			

1	2	3	4	5
1	<p>1) Registrasi dan notifikasi</p> <p>a) Registrasi b) Notifikasi</p> <p>2) Pemantauan</p> <p>a) Sektor industri b) Sektor non industri</p> <p>3) Evaluasi dan Tindak Lanjut</p> <p>a) Sektor industri b) Sektor non industri</p> <p>B. Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>1) Pengumpulan dan Pemanfaatan 2) Pengangkutan dan Pengolahan 3) Penimbunan dan Dumping 4) Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas</p> <p>a) Notifikasi b) Rekomendasi Limbah Lintas Batas</p> <p>C. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3</p> <p>1) Pemantauan</p> <p>a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas b) Manufaktur c) Agroindustri d) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi</p> <p>2) Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi</p> <p>a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas b) Manufaktur c) Agroindustri d) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
<p>2) Koordinasi Peruntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut</p> <p>a) Koordinasi penuntutan</p> <p>b) Evaluasi dan tindak lanjut</p> <p>3) Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>D. Perjanjian Internasional Lingkungan</p> <p>1) Pendapat Hukum Perjanjian Internasional</p> <p>a) Pendapat Hukum Proses Pengesahan Perjanjian Internasional</p> <p>b) Tindak Lanjut Perjanjian Internasional</p> <p>2) Evaluasi Perjanjian Internasional</p> <p>a) Evaluasi Perjanjian Internasional Pencernaan</p> <p>b) Evaluasi Perjanjian Internasional Perusakan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>	
<p>7</p> <p>KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT</p> <p>A. Komunikasi Lingkungan</p> <p>1) Pengembangan Komunikasi</p> <p>a) Pengelolaan Penguatan</p> <p>a) Program Komunikasi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5
<p>b) Evaluasi Komunikasi</p> <p>2) Publikasi dan Kampanye</p> <p>a) Publikasi</p> <p>b) Kampanye</p> <p>H. Penguatan Inisiatif Masyarakat</p> <p>1) Komunitas Pendidikan Lingkungan</p> <p>a) Pengembangan dan Bimbingan</p> <p>b) Evaluasi</p> <p>2) Kearifan Lingkungan</p> <p>a) Inventarisasi</p> <p>b) Revitalisasi</p> <p>C. Peningkatan Peran Masyarakat</p> <p>1) Masyarakat Perkotaan</p> <p>a) Masyarakat Kawasan Permukiman</p> <p>b) Masyarakat Kawasan Rentan</p> <p>2) Masyarakat Pedesaan</p> <p>a) Masyarakat Petani</p> <p>b) Masyarakat Nelayan</p> <p>D. Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan</p> <p>1) Organisasi Sosial Dan Masyarakat</p> <p>2) Organisasi Profesi dan Dunia Usaha</p> <p>8 PEMBIINAAN SARANA TEKNIK LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS</p> <p>A. Data dan Informasi Lingkungan</p> <p>1) Pengelolaan Data</p> <p>a) Pengumpulan dan Pengolahan Data</p> <p>b) Manajemen Basis Data</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>	



1	2	3	4	5
VI	<b>URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>			
1	Kebijakan penanggulangan bencana meliputi kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan logistik dan perlatan meliputi : 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun sejak penelaapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	<b>PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN</b> <b>A. Pengurangan Resiko Bencana</b> 1 Pencegahan a. Pengkajian Resiko b. Pengelolaan Resiko 2 Mitigasi a. Mitigasi Struktur b. Mitigasi Non Struktur <b>B. Pemberdayaan Masyarakat</b> 1 Peran Lembaga Usaha a. Usaha Padat Modal b. Usaha Padat Karya 2 Peran Organisasi Sosial Masyarakat a. Organisasi Internasional b. Organisasi Sosial Masyarakat Nasional 3 Peran Masyarakat a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
<p>b. Peningkatan Ketahanan Masyarakat</p> <p>C. Kesiapsiagaan</p> <p>1 Peringatan Dini</p> <p>a. Penaduan Sistem Jaringan</p> <p>b. Pemantauan dan Peringatan</p> <p>2 Perencanaan Siaga</p> <p>a. Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya</p> <p>b. Penerapan Rencana Strategis</p> <p>3 Penyiapan Sumber Daya</p> <p>a. Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya</p> <p>b. Pengendalian</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musabah</p>	
<p>3</p> <p>PENANGANAN DARURAT</p> <p>A. Tanggap Darurat</p> <p>1 Perencanaan Darurat</p> <p>a. Pendataan Darurat</p> <p>b. Perencanaan Operasi</p> <p>2 Pengendalian Operasi</p> <p>a. Pengorganisasian Pos Komando</p> <p>b. Sarana dan Prasarana Pos Komando</p> <p>3 Penyelamatan dan Evakuasi</p> <p>a. Penyelamatan</p> <p>b. Evakuasi</p> <p>B. Bantuan Darurat</p> <p>1 Bantuan Sاندang Pangan</p> <p>a. Bantuan Sاندang</p> <p>b. Bantuan Pangan</p> <p>2 Bantuan Kesehatan dan Air Bersih</p> <p>a. Bantuan Kesehatan</p> <p>b. Bantuan Air Bersih</p>	<p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musrah</p>	

1	2	3	4	5
1	<p>3 Bantuan Hunian Sementara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Hunian Sementara</li> <li>b. Pendukung Hunian Sementara</li> </ul> <p>C. Perbaikan Darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pembersihan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan Perlatan</li> <li>b. Angkutan</li> </ul> </li> <li>2 Perbaikan Sarana Vital <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prasarana Sosial</li> <li>b. Prasarana Ekonomi</li> </ul> </li> <li>3 Pemantauan dan Pelaporan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan</li> <li>b. Pelaporan</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>3 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
4	<p>REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI</p> <p>A. Penilaian Kerusakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Inventarisasi Kerusakan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inventarisasi Fisik</li> <li>b. Inventarisasi Sosial Ekonomi</li> </ul> </li> <li>2 Estimasi Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Estimasi Pembiayaan Pembangunan</li> <li>b. Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi</li> </ul> </li> </ul> <p>B. Pemulihan dan Peningkatan Fisik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rehabilitasi Fasilitas Umum</li> <li>b. Rekonstruksi Fasilitas Umum</li> </ul> </li> <li>2 Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rehabilitasi Fasilitas Sosial</li> <li>b. Rekonstruksi Fasilitas Sosial</li> </ul> </li> <li>3 Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rehabilitasi Rekonstruksi Berat</li> </ul> </li> </ul>	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>b. Rehabilitasi Rekonstruksi Ringan</p> <p>C. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi</p> <p>1 Pemulihan dan Peningkatan Sosial</p> <p>a. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya</p> <p>b. Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan</p> <p>2 Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi</p> <p>a. Pemulihan Ekonomi</p> <p>b. Peningkatan Ekonomi</p> <p>D. Penanganan Pengungsi</p> <p>1 Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi</p> <p>a. Perlindungan Pengungsi</p> <p>b. Pemberdayaan Pengungsi</p> <p>2 Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi</p> <p>a. Kompensasi</p> <p>b. Pengembalian hak</p> <p>3 Percepatan Pengungsi</p> <p>a. Pemulangan dan Repatriasi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<p>5</p> <p><b>LOGISTIK DAN PERALATAN</b></p> <p><b>A. Logistik</b></p> <p>1 Inventarisasi kebutuhan dan Pengadaan</p> <p>    a. Analisis Kebutuhan</p> <p>    b. Pengadaan</p> <p>2 Penyimpanan dan Distribusi</p> <p>    a. Penyimpanan</p> <p>    b. Distribusi</p> <p><b>B. Peralatan</b></p> <p>1 Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan</p> <p>    a. Analisis Kebutuhan</p> <p>    b. Pengadaan</p> <p>2 Penyimpanan dan Pemeliharaan</p> <p>    a. Penyimpanan</p> <p>    b. Pemeliharaan</p>	<p>b. Relokasi/Pengalihan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
	<p>1 Inventarisasi kebutuhan dan Pengadaan</p> <p>    a. Analisis Kebutuhan</p> <p>    b. Pengadaan</p> <p>2 Penyimpanan dan Distribusi</p> <p>    a. Penyimpanan</p> <p>    b. Distribusi</p>	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
	<p>2 Penyimpanan dan Distribusi</p> <p>    a. Penyimpanan</p> <p>    b. Distribusi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
	<p>1 Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan</p> <p>    a. Analisis Kebutuhan</p> <p>    b. Pengadaan</p> <p>2 Penyimpanan dan Pemeliharaan</p> <p>    a. Penyimpanan</p> <p>    b. Pemeliharaan</p>	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
		<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>3 Penggerakan dan Distribusi</p> <p>a. Penggerakan</p> <p>b. Distribusi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<b>VII</b>	<b>SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>			
1	<p>Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan Usaha, Pengkajian Sumber Daya KUKM Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Pengembangan Sumber Daya Manusia, MOU (Perjanjian Kerja Sama), Gerakan Kewirausahaan Nasional, Penetapan Bantuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian dan pengusulan Kebijakan</li> <li>- Penyusunan Kebijakan</li> <li>- Perumusan Kebijakan</li> <li>- Pemberian masukan dan dukungan Kebijakan</li> <li>- Penetapan dalam bentuk NSPK</li> </ul> <p>2 Monitoring dan Evaluasi</p> <p>3 Kelembagaan Koperasi dan UKM</p> <p>a Organisasi dan Badan Hukum Koperasi</p> <p>1 Organisasi Koperasi dan UKM</p> <p style="padding-left: 20px;">Organisasi Koperasi</p> <p style="padding-left: 20px;">Organisasi UKM</p> <p>2 Badan Hukum Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penatausahaan Badan Hukum Koperasi</li> <li>- Evaluasi Badan Hukum Koperasi</li> </ul> <p>3 Penelaahan Kasus Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasus Hukum Koperasi</li> <li>- Kasus Hukum UKM</li> </ul>	<p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
<p>b Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>1 Peraturan Perundang-Undangan Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi</li> <li>- Evaluasi Peraturan-Undangngan Koperasi</li> </ul> <p>2 Peraturan Perundang-Undangan UKM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UKM</li> <li>- Evaluasi Peraturan-Undangngan UKM</li> </ul> <p>3 Peraturan Perundang-Undangan Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk Peraturan Perundang-Undangngan Pusat</li> <li>- Peraturan Daerah</li> </ul> <p>c Tata laksana Koperasi dan UKM</p> <p>1 Tata laksana Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata laksana Koperasi Primer</li> <li>- Tata laksana Koperasi Sekunder</li> </ul> <p>2 Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata laksana Usaha Kecil</li> <li>- Tata laksana Usaha Mengah</li> </ul> <p>3 Klasifikasi Koperasi dan UKM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klasifikasi Koperasi</li> <li>- Klasifikasi UKM</li> </ul> <p>d Keanggotaan Koperasi</p> <p>1 Partisipasi Usaha dan Permodalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi Usaha</li> <li>- Partisipasi Permodalan</li> </ul> <p>2 Partisipasi Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Anggota</li> <li>- Pengawasan</li> </ul> <p>3 Pengembangan Anggota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaderisasi</li> <li>- Penyuluhan</li> </ul>	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musash</p>	

1	2	3	4	5
e	<p>Pengendalian dan Akuntabilitas</p> <p>1 Pengendalian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian Intern</li> <li>- Tindak Lanjut Hasil Pengendalian</li> </ul> <p>2 Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akuntabilitas</li> <li>- Akuntansi dan Audit</li> </ul> <p>3 Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring</li> <li>- Evaluasi</li> </ul> <p>4 Produksi</p> <p>a Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>1 Tanaman Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Padi</li> <li>Palawija</li> </ul> <p>2 Hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buah-Buahan dan Tanaman Obat</li> <li>Tanaman Hias dan Sayur</li> </ul> <p>3 Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana Produksi</li> <li>Sarana Pengolahan</li> </ul> <p>b Kehutanan dan Perkebunan</p> <p>1 Kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hutan Produksi</li> <li>Hutan Kemasyarakatan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
1	<p>2 Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah Tanaman Keras</p> <p>3 Sarana Sarana Produksi Sarana Pengolahan</p> <p>c Perikanan dan Peternakan 1 Perikanan Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya</p> <p>2 Peternakan Ternak Besar Ternak Kecil</p> <p>3 Sarana Sarana Produksi Sarana Pengolahan</p> <p>d Industri Kerajinan dan Pertambangan 1 Industri - Sandang, Logam dan Elektronika - Pangan, Kimia dan Aneka</p> <p>2 Kerajinan Logam Non Logam</p> <p>3 Pertambangan dan Migas pertambangan Umum Pertambangan Migas</p> <p>e Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha 1 Ketenagalistrikan dan Konstruksi Listrik Konstruksi</p> <p>2 Aneka Usaha Jasa Umum Angkutan</p> <p>3 Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Pariwisata Pos dan Telekomunikasi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<p>B Pembinaan kesenian dan perfilman</p> <p>1 Pembinaan seni pertunjukan</p> <p>a Seni pertunjukan tradisional</p> <p>b Seni pertunjukan nontradisional</p> <p>2 Pembinaan seni rupa</p> <p>a Seni rupa murni</p> <p>b Seni rupa terapan</p> <p>C Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi</p> <p>1 Kelembagaan dan kepercayaan</p> <p>a Pemberdayaan lembaga</p> <p>b Hubungan antar lembaga</p> <p>2 Komunitas kepercayaan</p> <p>a Komunitas adat</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>	

1	2	3	4	5
	<p>b Upacara adat</p> <p>3 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional</p> <p>a Pengetahuan tradisional</p> <p>b Ekspresi budaya tradisional</p> <p>4 Lingkungan budaya dan pranata sosial</p> <p>a Lingkungan budaya</p> <p>b Pranata sosial</p> <p>D Sejarah dan nilai budaya</p> <p>1 Sejarah</p> <p>a Penggalian sumber sejarah</p> <p>b Penulisan sejarah</p> <p>2 Pemetaan nilai</p> <p>a Pemetaan</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>b Klasifikasi</p> <p>3 Verifikasi dan perumusan nilai</p> <p>a Verifikasi nilai</p> <p>b Perumusan nilai</p> <p>4 Dokumentasi dan publikasi</p> <p>a Dokumentasi sejarah dan nilai budaya</p> <p>b Publikasi sejarah dan nilai budaya</p> <p>k Internalisasi nilai dan diplomasi budaya</p> <p>1 Internalisasi nilai budaya</p> <p>a Pengemasan nilai budaya</p> <p>b Penanaman nilai budaya</p> <p>2 Keleayaan budaya</p> <p>a Pencatatan kekayaan budaya</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b Penetapan kekayaan budaya</li> <li>3 Warisan budaya nasional dan dunia               <ul style="list-style-type: none"> <li>a Warisan budaya benda</li> <li>b Warisan budaya takbenda</li> </ul> </li> </ul>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
5	<b>PENILAIAN PENDIDIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Penilaian akademik</li> <li>B Penilaian non akademik</li> <li>C Analisis dan sistem informasi penilaian</li> </ul>	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
6	<b>PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Pengembangan dan perlindungan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pengkajian                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a Bahasa</li> <li>b Sastra</li> </ul> </li> <li>2 Pembakuan dan perlindungan</li> <li>3 Informasi dan publikasi</li> </ul> </li> </ul>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
7	<p><b>B Pembiayaan dan pemasyarakatan</b></p> <p>1 Pemasyarakatan</p> <p>a Penyuluhan</p> <p>b Bantuan teknis</p> <p><b>C Pembelajaran</b></p> <p>a Proses pembelajaran</p> <p>b Pembinaan tenaga kebahasaan dan kesusastreraan</p> <p><b>D Peningkatan dan pengendalian</b></p> <p>a Peningkatan fungsi dan peran</p> <p>b Pengendalian penggunaan bahasa</p> <p><b>PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN</b></p> <p><b>A Pengembangan profesi pendidik</b></p> <p>1 Peningkatan kompetensi</p> <p>a Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal</p> <p>b Pengembangan profesi pendidikan dasar</p> <p>c Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah</p> <p>2 Sertifikasi</p> <p>a Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal</p> <p>b Pengembangan profesi pendidikan dasar</p> <p>c Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah</p> <p><b>B Pengembangan tenaga kependidikan</b></p> <p>1 Program</p> <p>a Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik</p> <p>b Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>2 Evaluasi</p> <p>a Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik</p> <p>b Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai</p> <p>C Pengembangan SDM kebudayaan</p> <p>1 Program</p> <p>a Peningkatan kompetensi</p> <p>b Sertifikasi</p> <p>2 Evaluasi</p> <p>a Peningkatan kompetensi</p> <p>b Sertifikasi</p> <p>D Penjaminan mutu pendidikan</p> <p>1 Pemetaan mutu</p> <p>a Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal</p> <p>b Penjaminan mutu pendidikan dasar</p> <p>c Penjaminan mutu pendidikan menengah</p> <p>2 Sistem informasi</p> <p>a Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal</p> <p>b Penjaminan mutu pendidikan dasar</p> <p>c Penjaminan mutu pendidikan menengah</p> <p>F Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman</p> <p>G Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi</p> <p>H Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<p>1 Penyaluran block grant pascaberencana</p> <p>4 Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>	
<p>8</p> <p>TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN</p> <p>A Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film</p> <p>1 Perancangan dan produksi</p> <p>2 Penyiaran dan pengendalian</p> <p>B Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan web</p> <p>1 Perancangan dan produksi</p> <p>2 Aplikasi dan pengendalian</p> <p>C Pengembangan jejaring</p> <p>1 Pengkajian dan perancangan</p> <p>2 Pemeliharaan dan pengendalian</p> <p>1 Proposal/TOR/KAK</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>	
<p>9</p> <p>DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN</p> <p>A Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan</p> <p>1 Validasi dan integrasi data peserta didik</p> <p>2 Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	

1	2	3	4	5
10	<p>B Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Validasi dan integrasi data satuan pendidikan</li> <li>2 Validasi dan integrasi data proses pembelajaran</li> </ol> <p>C Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak</li> <li>2 Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dasar dan menengah</li> <li>3 Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik</li> </ol> <p>MONTORING DAN EVALUASI</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	2 Tahun	Permanen
IX	<b>SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
1	<p>Kebijakan</p> <p>Kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan</li> <li>B. Penyiapan kebijakan</li> <li>C. Perumusan kebijakan</li> <li>D. Masukan dan dukungan kebijakan</li> <li>E. Penetapan NSPK</li> </ol>	<p>5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p>	1 Tahun	Permanen
2	<p>Pengurusutamaan gender Ekonomi, politik sosial dan hukum</p> <p>A. Data gender</p>	<p>4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	1 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
<p>B. Advokasi dan fasilitasi</p> <p>C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan gender</p> <p>3. Perlindungan perempuan ( kekerasan, masalah sosial, tenaga kerja, korban perdagangan )</p> <p>A. Data perlindungan perempuan</p> <p>B. Advokasi dan fasilitasi</p> <p>C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan</p> <p>D. Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender</p> <p>E. Analisis dan penyajian informasi gender</p> <p>4. Perlindungan anak ( hak sipil, masalah sosial, kekerasan terhadap anak, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum )</p>	<p>4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>	

1	2	3	4	5
	<p>A. Data perlindungan anak</p> <p>B. Advokasi dan fasilitasi</p> <p>C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musrab</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	<p>5 Tumbuh kembang anak ( pendidikan, kesehatan, partisipasi, lingkungan dan pemenuhan nilai-nilai luhur, pengembangan kota layak anak )</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musrab</p>
	<p>A. Data tumbuh kembang anak</p> <p>B. Advokasi dan fasilitasi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	<p>C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

1		3	4	5
X	SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	<b>KEBIJAKAN</b> Kebijakan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan bahan 3 Perumus Kebijakan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 penetapan dalam bentuk NSPK Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika 1 Teknik Pos dan Telekomunikasi 2 Teknik Komunikasi Radio 3 Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi 4 Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar 5 Standar dan Audit Perangkat Lunak	5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	<b>SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA</b> A. Penataan Sumber Daya 1 Alokasi Spektrum Dinas - Alokasi Dinas Tetap - Alokasi Dinas Bergerak Darat 2 Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat - Alokasi Dinas Penyerahan - Alokasi Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit 3 Orbit Satelit - Notifikasi dan Penataan Filing Satelit - Tata Kelola Hubungan Antarpenyelenggara 4 Ekonomi Sumber Daya - Analisa Industri dan Ekonomi - Penanganan Izin Pita	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun  2 Tahun  2 Tahun	Musnah  Musnah  Musnah

1	2	3	4	5
1	<p>5 Harmonisasi Teknik Spektrum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik Spektrum Antar Lembaga</li> <li>- Harmonisasi dan Notifikasi Terrestrial</li> </ul> <p>B. Operasi Sumber Daya</p> <p>1 Pelayanan Spektrum Dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Dinas Telap</li> <li>- Pelayanan Dinas Bergerak Darat</li> </ul> <p>2 Pelayanan Spektrum Non Dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Dinas Penyiaran</li> <li>- Pelayanan Dinas Penerbangan, Maritim, dan Satelit</li> </ul> <p>3 Sertifikasi Operator Radio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika</li> <li>- Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar penduduk</li> <li>- Pelayanan Operator Radio</li> </ul> <p>4 Penanganan Biaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan Putang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio</li> <li>- Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio</li> </ul> <p>5 Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultasi dan informasi Sumber Daya</li> <li>- Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya</li> </ul> <p>C. Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika</p> <p>1 Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rancang Bangun Teknologi Monitoring Spektrum</li> <li>- Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Spektrum</li> </ul> <p>2 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Spektrum</li> <li>- Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<p>3 Monitoring dan Penertiban Spektrum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan Bergerak Terrestrial</li> <li>- Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap dan Bergerak Terrestrial</li> </ul> <p>4 Monitoring dan Penertiban</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika</li> <li>- Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	
<p>3 PENYELenggaraAN POS DAN INFORMATIKA</p> <p>A. Pos</p> <p>1 Layanan dan Penerapan Pos Universal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan</li> <li>- Penerapan Layanan</li> </ul> <p>2 Layanan Pos Komersial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata Kelola Layanan</li> <li>- Data dan Informasi Layanan</li> </ul> <p>3 Prangko dan Filateli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prangko</li> <li>- Filateli</li> </ul> <p>4 Iklim Usaha Pos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pos Universal</li> <li>- Pos Komersial</li> </ul> <p>5 Pentarifan Pos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Pos Universal</li> <li>- Pos Komersial</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5
1	<p>B. Telekomunikasi</p> <p>1 Layanan Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses</li> <li>- Backbone</li> </ul> <p>2 Layanan Jasa Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa</li> <li>- Jasa Multimedia</li> </ul> <p>3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penomoran Telekomunikasi</li> <li>- Penomoran Informatika</li> </ul> <p>4 Tarif dan Interkoneksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarif Telekomunikasi</li> <li>- Interkoneksi Telekomunikasi</li> </ul> <p>5 Kelayakan Sistem Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelayakan Sistem Jaringan dan Jasa</li> <li>- Penerapan Teknologi Telekomunikasi</li> </ul> <p>C. Penyiaran</p> <p>1 Pemetaan dan Database</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi</li> <li>- Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi</li> </ul> <p>2 Verifikasi dan Uji Coba Siaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio</li> <li>- Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
1	<p>3 Radio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio</li> <li>- Lembaga Penyiaran Swasta Radio</li> </ul> <p>4 Televisi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi</li> <li>- Lembaga Penyiaran Swasta Televisi</li> </ul> <p>5 Iklim Usaha Penyiaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Penyiaran</li> <li>- Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran</li> </ul> <p>D. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal</p> <p>1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisa Penyelenggaraan</li> <li>- Pelayanan</li> </ul> <p>2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisa Penyelenggaraan</li> <li>- Pelayanan</li> </ul> <p>3 Layanan Khusus Penyiaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik Radio</li> <li>- Publik Televisi</li> </ul> <p>4 Pelayanan Kewajiban Universal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi</li> </ul> <p>5 Pengembangan Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Infrastruktur</li> <li>- Analisa Ekonomis Infrastruktur</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<p>E. Pengendalian Pos dan Informatika</p>	<p>1 Monitoring dan Evaluasi Pos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring</li> <li>- Evaluasi</li> </ul> <p>2 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring</li> <li>- Evaluasi</li> </ul> <p>3 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring</li> <li>- Evaluasi</li> </ul> <p>4 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring</li> <li>- Evaluasi</li> </ul> <p>5 Pencegahan dan Penerbitan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan</li> <li>- Penerbitan</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>4</p>	<p>APLIKASI INFORMATIKA</p> <p>A. e-Government</p> <p>1 Tata Kelola e-Government</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program e-Government</li> <li>- Evaluasi e-Government</li> </ul> <p>2 Teknologi dan Infrastruktur e-Government</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi e-Government</li> <li>- Infrastruktur e-Government</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>3 Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Government</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interoperabilitas e-Government</li> <li>- Interkoneksi e-Government</li> </ul> <p>4 Aplikasi Layanan Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi Layanan Pemerintahan Pusat</li> <li>- Aplikasi Layanan Pemerintahan Daerah</li> </ul> <p>5 Aplikasi Layanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inisiasi Aplikasi Layanan Publik</li> <li>- Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik</li> </ul> <p>B. e-Business</p> <p>1 Tata Kelola e-Business</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program e-Business</li> <li>- Evaluasi e-Business</li> </ul> <p>2 Teknologi dan Infrastruktur e-Business</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi e-Business</li> <li>- Infrastruktur e-Business</li> </ul> <p>3 Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Business</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interoperabilitas e-Business</li> <li>- Interkoneksi e-Business</li> </ul> <p>4 Aplikasi Layanan e-Business</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Usaha Kecil dan Mikro</li> <li>- Bidang Usaha Menengah dan Besar</li> </ul> <p>C. Pemberdayaan Informatika</p> <p>1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perancangan Model</li> <li>- Penerapan Model</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>2 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Model</li> <li>- Penerapan Model</li> </ul> <p>3 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Tertuar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Model</li> <li>- Penerapan Model</li> </ul> <p>4 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Model</li> <li>- Penerapan Model</li> </ul> <p>D. Pemberdayaan Industri Informatika</p> <p>1 Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan</li> <li>- Promosi</li> </ul> <p>2 Industri Perangkat Informatika Pengguna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan</li> <li>- Pengembangan Produk</li> </ul> <p>3 Industri Perangkat Lunak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan</li> <li>- Pengembangan Produk</li> </ul> <p>4 Industri Konten Multimedia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan</li> <li>- Pengembangan Produk</li> </ul> <p>E. Keamanan Informasi</p> <p>1 Tata Kelola Keamanan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan</li> <li>- Manajemen Risiko</li> </ul> <p>2 Teknologi Keamanan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastruktur</li> <li>- Aplikasi</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<p>3 Monitoring, Evaluasi, dan Tanggapan Darurat Keamanan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastruktur</li> <li>- Aplikasi</li> </ul> <p>4 Penyidikan dan Penindakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring dan Evaluasi Keamanan informasi</li> <li>- Tanggapan Darurat Peristiwa Keamanan informasi</li> </ul> <p>5 Budaya Keamanan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyidikan</li> <li>- Penindakan</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>	
<p>5</p> <p>INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</p> <p>A. Komunikasi Publik</p> <p>1 Tata Kelola Komunikasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Komunikasi Publik</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi</li> </ul> <p>2 Pengelolaan Opini Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan Opini Publik</li> <li>- Pengolahan Opini Publik</li> </ul> <p>3 Layanan Komunikasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan Data</li> <li>- Pengolahan Data</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	
<p>B. Pengolahan dan Penyediaan Informasi</p> <p>1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Politik dan Keamanan</li> <li>- Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5
	<p>2 Informasi Perekonomian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keuangan, Perdagangan, dan Jasa</li> <li>- Industri dan Perdagangan</li> </ul> <p>3 Informasi Kesejahteraan Rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agama, Sosial, dan Budaya</li> <li>- Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup</li> </ul> <p>C. Pengelolaan Media Publik</p> <p>1 Media Cetak</p> <p>2 Media Online</p> <p>3 Media Liris Ruang dan Audio Visual</p> <p>D. Kemitraan Komunikasi</p> <p>1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi</li> </ul> <p>2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Kemitraan media dan Dunia Usaha</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi</li> </ul> <p>3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>E. Layanan Informasi Internasional</p> <p>1 Layanan Informasi Media Asing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Layanan informasi media Asing</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi</li> </ul> <p>2 Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi</li> </ul> <p>3 Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Layanan informasi</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Layanan informasi</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
6	<p>PUSAT DATA DAN SAIRAWA INFORMATIKA</p> <p>A. Infrastruktur Informatika</p> <p>Jaringan</p> <p>Piranti Teknologi Informatika</p> <p>Kemamanan Informatika</p> <p>B. Sistem dan Data</p> <p>Portal dan Konten</p> <p>Pengumpulan dan Pengolahan Data</p> <p>Pengembangan Aplikasi</p> <p>C. Pusat Kerjasama Internasional</p> <p>1 Kerja Sama Multilateral</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Multilateral</li> <li>- Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Multilateral</li> <li>- Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Multilateral</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
		<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
<p>2 Kerja Sama Regional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional</li> <li>- Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Regional</li> <li>- Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Regional</li> </ul> <p>3 Kerja Sama Bilateral</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Multilateral</li> <li>- Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Multilateral</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	
<p>D. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat</p> <p>1 Pelayanan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- media Baru</li> <li>- media Konvensional</li> <li>- Dokumentasi dan Perpustakaan</li> </ul> <p>2 Hubungan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Publikasi</li> <li>- Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik</li> <li>- Hubungan Internal dan Eksternal</li> </ul> <p>3 Bimbingan Teknis</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	
<p>Bimbingan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana Informatika, Informasi dan Humas</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	
<p>4. Evaluasi</p> <p>Evaluasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana Informatika, Informasi dan Humas</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	

**XI SEKTOR POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN URUSAN HUKUM****A. SUB URUSAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan meliputi kebijakan dibidang: Pembentukan Peraturan

1. Perundang-Undangan, Pembentukan Keputusan/Penetapan, Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, Kerjasama Hukum, Dokumen Hukum, dan Uji Materi Peraturan Perundang-Undangan

a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan

b. Penyajian kebijakan

c. Perumusan dan penyusunan bahan

d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan

e. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)

2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan/Regeling

a. Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

a.1. Usul Prakarsa Peraturan Daerah

a.2. Bahan/materi program legislasi daerah dari instansi pusat

a.3. Program legislasi instansi daerah

b. Penyusunan Peraturan Daerah

b.1. Naskah Akademik Peraturan Daerah

b.2. Rancangan Peraturan Daerah

b.3. Tanggapan/Pendapat Para Ahli terhadap Peraturan Daerah

b.4. Materi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Lembaga Pengusul

b.5. Materi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Legislatif

b.6. Keterangan, Jawaban Pemerintah mengenai rancangan peraturan daerah

c. Pembahasan Peraturan Daerah

c.1. Permohonan (Perda)

c.2. Tanggapan Rancangan Peraturan Daerah (Perda)

c.3. Penyampaian hasil pengharmonisasian, pembetulan dan pematapan konsepsi peraturan daerah dan draft akhir

d. Pengesahan dan Penetapan

d.1. Pemberian paraf oleh lembaga terkait

d.2. Penandatanganan draft final oleh pimpinan lembaga pengusul

d.3. Penandatanganan oleh pejabat yang menandatangani

d.4. Penandatanganan oleh pejabat yang menandatangani

d.5. Penandatanganan oleh pejabat yang menandatangani

d.6. Penandatanganan oleh pejabat yang menandatangani

d.7. Penandatanganan oleh pejabat yang menandatangani

d.8. Penandatanganan oleh pejabat yang menandatangani

d.9. Penandatanganan oleh pejabat yang menandatangani

1	2	3	4	5
<p>e. Pengundangan</p> <p>3. Pembentukan Keputusan/Penetapan (Beschikking)</p> <p>a. Keputusan/Surat Edaran/Instruksi :</p> <p>a.1 Keputusan Pimpinan Daerah:</p> <p>a.1.1. Pengajuan draf dari unit pengusul</p> <p>a.1.2. Telaah hukum</p> <p>a.1.3. Perbaikan draf</p> <p>a.1.4. Penetapan</p> <p>4. Publikasi Peraturan Daerah</p> <p>a. Sosialisasi/Penyuluhan/Diseminasi peraturan perundang-undangan Penyebarnya peraturan perundang-undangan</p> <p>5. Kerjasama Hukum</p> <p>a. Usul prakasa dari lembaga/unit kerja</p> <p>b. Konsultasi dan koordinasi</p> <p>c. Rapat intern/antar unit</p> <p>d. Usul prakasa dari lembaga/unit kerja</p> <p>e. Penajajaran, perundingan, perumusan masalah, penerimaan/pemarafan</p> <p>f. Draft final</p> <p>g. Penandatanganan</p> <p>6. Dokumentasi Hukum</p> <p>Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)</p> <p>7. Uji Materi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>a. Pengajuan permohonan</p> <p>b. pendaftaran</p> <p>c. Penjadwalan sidang</p> <p>d. Pemeriksaan Pendahuluan</p> <p>e. Pemeriksaan Persidangan</p> <p>f. Putusan</p>	<p>3</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>	

1	2	3	4	5
<b>XII</b>	<b>SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KETENAGAKERJAAN</b>			
1	PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Pembinaan Pembangunan Kawasan dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat. - Pengkajian dan pengusunan kebijakan - Penyediaan bahan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Pengumpulan dan pengolahan data - Penetapan dalam bentuk peraturan berupa norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN A. Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan 1. Bina Sistem Informasi a. Sistem Informasi Permukiman b. Sistem Informasi Kawasan 2. Perencanaan Pengembangan Kawasan a. Penataan Ruang dan Infrastruktur Kawasan b. Pengembangan Sosial dan Ekonomi 3. Perencanaan Pengembangan Masyarakat a. Pengembangan Usaha Ekonomi b. Pengembangan Sosial Budaya 4. Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan a. Penataan Ruang dan Infrastruktur Pusat Pertumbuhan b. Pengelolaan Kelembagaan Sosial dan Ekonomi B. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat 1. Bantuan Pangan dan Kesehatan a. Penyediaan Bantuan Pangan b. Penyediaan Bantuan Kesehatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah



1	2	3	4	5
D	<p><b>Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Analisis dan Standarisasi Sarana</li> <li>b Analisis dan Standarisasi Prasarana</li> </ol> </li> <li>2 Pengembangan Sarana               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Bina Perencanaan Teknis Sarana</li> <li>b Bina Pelaksanaan Sarana</li> </ol> </li> <li>3 Pengembangan Prasarana               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Bina Perencanaan Teknis Prasarana</li> <li>b Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana</li> </ol> </li> <li>4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana</li> <li>b Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana</li> </ol> </li> </ol> <p><b>E. Penyerasian Lingkungan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Persiapan Pengelolaan Lingkungan</li> <li>b Pemantauan Lingkungan</li> </ol> </li> <li>2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Adaptasi Lingkungan</li> <li>b Mitigasi Lingkungan</li> </ol> </li> <li>3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Pemantauan Perkembangan Permukiman Transmigrasi</li> <li>b Pengalihan Status Pembinaan Permukiman Transmigrasi</li> </ol> </li> </ol>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
1	4. Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis Perkembangan Pusat Pertumbuhan</li> <li>b. Pemantauan Perkembangan Pusat Pertumbuhan</li> </ul>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	4 Tahun	Permanen
<b>XIII</b>	<b>SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN</b>			
1	Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan daerah meliputi : rencana pembangunan jangka panjang (RPJ/P)/Master Plan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan nasional. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian dan pengusulan kebijakan</li> <li>- Penyiapan kebijakan</li> <li>- Perumusan dan penyusunan bahan</li> <li>- Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</li> <li>- Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan</li> </ul>	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	6 Tahun	Permanen
2	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Musrenbang Kabupaten</li> <li>b. Musrenbang kecamatan</li> <li>c. Musrenbang desa</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	6 Tahun	Permanen
3	Perencanaan Pembangunan Kementerian/Lembaga <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah / Renstra-KL</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	6 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
<p>b. Rencana Pembangunan Tahunan SOPD/Lembaga ( Kerja-KL)</p> <p>c. Program Kerja Tahunan</p> <p>1 Usulan Unit Kerja beserta data pendukungnya</p> <p>2 Program kerja tahunan Unit Kerja</p> <p>3 Program Kerja Tahunan Lembaga</p> <p>d. Penetapan/kontrak Kinerja</p> <p>1 Pimpinan Unit Kerja</p> <p>2 Ketua/Kepala Badan Pemerintah/Instansi</p> <p>e. Laporan</p> <p>1 Berkala</p> <p>a. Laporan Triwulan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5
<p>b Laporan Semesteran</p> <p>c Laporan Tahunan Unit Kerja</p> <p>d Laporan Tahunan Lembaga/Instansi</p> <p>e Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>2 Laporan Insidental</p> <p>f Evaluasi Program</p> <p>1 Unit Kerja</p> <p>2 Lembaga/Instansi</p> <p>4 Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>	

1	2	3	4	5
5	Konsultasi perencanaan pembangunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
6	Pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	6 Tahun	Permanen
7	Aksi Strategis Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rancangan awal perencanaan aksi strategis daerah</li> <li>- Rapat pembahasan rancangan awal dengan K/L</li> <li>- Sosialisasi dengan K/L</li> <li>- Rancangan akhir perencanaan aksi strategis daerah</li> <li>- Penetapan perencanaan aksi strategis daerah</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
8	Perencanaan Pendanaan Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pendanaan Dalam Negeri</li> <li>c. Kerjasama Pembangunan nasional</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
<b>XIV</b>	<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>			
1	<b>KEBIJAKAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pengkajian dan pengusunan kebijakan</li> <li>2 Penyajian kebijakan</li> <li>3 Perumusan dan penyusunan bahan</li> <li>4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</li> <li>5 Penetapan</li> </ol>	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	4 Tahun	Permanen
2	<b>PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Deposit Bahan Pustaka</li> </ol>			

1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam</li> <li>2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman</li> <li>3 Terbitan Internasional dan Regional</li> <li>4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam</li> <li>5 Bibliografi dan Katalog <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bibliografi Nasional Indonesia (BNI)</li> <li>b. Bibliografi Daerah (BD)</li> <li>c. Katalog Induk Nasional (KIN)</li> <li>d. Katalog Induk Daerah (KID)</li> <li>e. Katalog Balam Terbitan (KDT)</li> </ol> </li> <li>6 Pendaftaran Nomor Internasional Standard Book Number (ISBN)</li> <li>7 Pendaftaran Nomor Internasional Standard Music Number (ISMN)</li> </ol> <p>B Pengembangan Koleksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Akuisisi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembelian</li> </ol> </li> </ol>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>8 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
b. Hibah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen	
c. Hadiah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
d. Tukar Menukar	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
e. Implementasi Undang-Undang KCKR	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah	
f. Terbitan Internal	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	
g. Pendistribusian bahan pustaka surplus	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen	
h. Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen	
2 Pengolahan Bahan Pustaka	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen	
3 Pengkajian Data Katalog Koleksi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah	

1	2	3	4	5
C Jasa Perpustakaan dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Keanggotaan</li> <li>2 Sirkulasi</li> <li>3 Referensi</li> <li>4 Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara</li> <li>5 Kerjasama Perpustakaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mutu</li> <li>b. Perjanjian kerjasama</li> <li>c. Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional</li> </ol> </li> <li>6 Pengembangan implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan situs web</li> <li>b. Pengembangan kemas ulang informasi multimedia</li> </ol> </li> </ol>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

<p>c. Pengembangan program aplikasi perpustakaan</p> <p>d. Pengembangan pangkalan data perpustakaan digital</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>7 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>D. Preservasi Bahan Pustaka</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>1 Konservasi</p> <p>a. Perawatan Bahan Perpustakaan</p> <p>b. Perbaikan Bahan Perpustakaan</p> <p>c. Penjilidan Bahan Perpustakaan</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>2 Reprograf (Mikrofilm, Reproduksi Foto)</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>3 Transformasi Digital</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>4 Kurasi Digital</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>3 SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN</p>			
<p>A Pengembangan Perpustakaan dan Pengalihan Minat Baca</p>			
<p>1 Pengembangan Perpustakaan</p> <p>a. Perpustakaan Umum</p> <p>b. Perpustakaan Khusus</p> <p>c. Perpustakaan Sekolah</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
2 Akreditasi Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permintaan akreditasi</li> <li>b. Pemberian akreditasi</li> <li>c. Pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi</li> </ul>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	1 Tahun	Musnah
3 Pangkalan Data Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor Pokok Perpustakaan</li> <li>b. Perpustakaan Berbasis Wilayah</li> </ul>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	4 Tahun	Permanen
4 Pemasarakan Minat Baca	5 Organisasi Perpustakaan	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	4 Tahun	Musnah
B Pengembangan Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Forum Perpustakaan Umum</li> <li>b. Forum Perpustakaan Khusus</li> <li>c. Forum Perpustakaan Sekolah</li> <li>d. Gerakan Pemasarakan Minat Baca</li> <li>e. Organisasi Perpustakaan Lainnya</li> </ul>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	1 Tahun	Musnah
1 Sertifikasi Tenaga Perpustakaan		<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	4 Tahun	Musnah
2 Pembinaan Tenaga Perpustakaan		<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	4 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
1	<p>3 Penerbitan Jurnal</p> <p>4 Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan</p> <p>    a. Tim Penilai Instruksi/Perpustakaan Nasional</p> <p>    b. Tim Penilai Pusat</p> <p>5 Pemasyarakatan</p> <p>6 Evaluasi Tenaga Perpustakaan</p> <p>7 Pengkaban data Tenaga Perpustakaan</p> <p>8 Pengkaban data Tim Penilai Pustakawan</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<b>XV</b>	<b>URUSAN KESEHATAN</b>			
1	<p><b>PERUMUSAN KEBIJAKAN</b></p> <p>Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan:</p> <p>A Pengkajian dan pengusulan kebijakan</p> <p>B Penyajian bahan</p> <p>C Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>D Pengumpulan dan pengolahan data</p> <p>E Penetapan dalam bentuk naskah dan standarisasi</p>	<p>3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
2	<p>UPAYA KESEHATAN</p> <p>A. Upaya Kesehatan Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Praktik Klinis Bagi Dokter di Puskesmas Primer</li> <li>2 Pelaksanaan Kesehatan Primer</li> <li>3 Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas</li> <li>4 Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit</li> <li>5 ICD 10, Dentistry &amp; Stomatology</li> <li>6 Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah</li> <li>7 Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil dan kepulauan</li> <li>8 Akreditasi Puskesmas</li> </ol>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>9 Puskesmas Berprestasi</p> <p>B. Upaya Kesehatan Rujukan</p> <p>1 Pelayanan Kesehatan Rujukan</p> <p>1 Rumah Sakit Pratama</p> <p>2 Rumah Sakit Publik</p> <p>2 Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)</p> <p>3 Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain</p> <p>a Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Rujukan Regional</p> <p>4 Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan</p> <p>a Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan</p> <p>b Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri</p> <p>5 Badan Pengawas di Rumah Sakit</p> <p>6 Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain</p> <p>a Akreditasi Rumah Sakit Standar Internasional (JCI)</p> <p>b Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional</p> <p>c Rumah Sakit Pasca Akreditasi Nasional</p> <p>d Surveyor Akreditasi Rumah Sakit</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
<p>j Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>k Prasarana Rumah Sakit Keselamatan Jiwa</p> <p>l Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Gas Medik Dan Vakum Medik</p> <p>m Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Tata Udara</p> <p>n Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif</p> <p>o Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif</p> <p>G) Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>a Kalibrasi BPPK/LPPK/UPPK</p> <p>b Kalibrasi Rumah Sakit</p> <p>c Kalibrasi Puskesmas</p> <p>d Pemeliharaan Peralatan kesehatan Rumah Sakit</p> <p>e Pemeliharaan Peralatan kesehatan Puskesmas</p> <p>7) Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK)</p> <p>a ASPAK Rumah Sakit</p> <p>b ASPAK Puskesmas</p> <p>c ASPAK Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	
<p>E) Kesehatan Jiwa</p> <p>1) Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>a Kesehatan Jiwa di Desa Siaga</p> <p>b Keawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>c Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>2) Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>a Layanan Unggulan di RS Jiwa</p> <p>b Rehabilitasi Psikososial di RS Jiwa</p> <p>c Indikator Mutu RS Jiwa</p> <p>d Mutu Layanan Jiwa di RS Jiwa dan RSUD sesuai Penyelenggaraan RS</p> <p>3) Etikolegal dan Asesmen</p> <p>a Penanggulangan Penyalahgunaan dan Pemasunggan Serta Penanganan Salah Lainnya Terhadap Virus H1 N1</p> <p>b Penanggulangan dan Penanganan Masalah Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Rokok, dan Alkohol</p> <p>4) Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Rokok, dan Alkohol</p> <p>a Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)</p> <p>b Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol</p> <p>c Wajib Lapar Pecandu Narkotika</p> <p>d Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan Tembakau</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	
<p>3) Etikolegal dan Asesmen</p> <p>a Penanggulangan Penyalahgunaan dan Pemasunggan Serta Penanganan Salah Lainnya Terhadap Virus H1 N1</p> <p>b Penanggulangan dan Penanganan Masalah Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Rokok, dan Alkohol</p> <p>4) Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Rokok, dan Alkohol</p> <p>a Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)</p> <p>b Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol</p> <p>c Wajib Lapar Pecandu Narkotika</p> <p>d Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan Tembakau</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	

<p>5) Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko</p> <p>a Kesehatan Jiwa Di Sekolah</p> <p>b Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana</p> <p>c Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>3</p> <p>PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN</p> <p>A Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Mata</p> <p>1) Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)</p> <p>a Difteri</p> <p>b Polio</p> <p>c Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre-TAS Giardiasis</p> <p>d Surveilans influenza</p> <p>e Keracunan Pangan</p> <p>2) Imunisasi</p> <p>a Pekan Imunisasi Nasional</p> <p>b Coldchain Bagi Petugas Imunisasi</p> <p>c Introduksi Imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi dan Balita</p> <p>d Imunisasi bagi Petugas Kesehatan</p> <p>e Imunisasi di Daerah Sullit</p> <p>f Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS)</p> <p>g Imunisasi bagi masyarakat umum</p> <p>h Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanangan vaksin baru DPT-HB-HIB</p> <p>i Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan Hib B/ Haemophilis</p> <p>3) Kesehatan Mata</p> <p>a Madik Sehat</p> <p>b Kesehatan bagi Penumpang Darat, Penumpang Kapal Laut dan Penumpang Pesawat Udara</p> <p>c Kesehatan Migran</p> <p>d Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>B Pengendalian Penyakit Menular Langsung</p> <p>1) Pengendalian Tuberkulosis</p> <p>a Pengendalian Penyakit TB</p> <p>b TB Multi Drug Resistance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB, Laboratorium TB</p> <p>c</p> <p>2) Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>a Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) / Integrated Bio-Behavioural Surveillance</p> <p>b Human Immuno Deficiency Virus (HIV)</p> <p>c Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling dan Obat Anti Retro Viral (ARV) dan reagen tes HIV</p> <p>d Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut</p> <p>3) Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS CoV)</p> <p>b Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)</p> <p>4) Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan</p> <p>a Diare</p> <p>b Tifoid</p> <p>c Hepatitis</p> <p>5) Pengendalian Kusta dan Frambusia</p> <p>a Kusta</p> <p>b Frambusia</p> <p>c Aliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANER)</p> <p>C Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang</p> <p>1) Pengendalian Malaria</p> <p>a Kelambu berinsektisida (LIDNS)</p> <p>b Eliminasi malaria</p> <p>c Crosscheke mikroskopis malaria</p> <p>2) Pengendalian Arbovirolosis</p> <p>a DHD</p> <p>b Chikungunya</p> <p>c Ebola</p> <p>3) Pengendalian Zoonosis</p> <p>a Penyakit flu burung</p> <p>b Vaksin Anti Rabies (VAR) baru</p> <p>c Penyakit Pes</p> <p>d Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H1.N.1)</p> <p>4) Pengendalian Filariasis dan Kecacingan</p> <p>a Filariasis</p> <p>b Kecacingan</p> <p>c Schistosomiasis</p> <p>5) Pengendalian Vektor</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<p>D) Pengendalian Penyakit Tidak Menular</p> <p>1) Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyakit Jantung</li> <li>Penyakit Pembuluh darah</li> <li>Penyakit Hipertensi</li> <li>Penyakit Stroke</li> </ol> <p>2) Pengendalian Diabetes Mellitus dan Penyakit Metabolik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyakit Diabetes Mellitus</li> <li>Penyakit gangguan Metabolik</li> <li>Penyakit gangguan Tiroid</li> <li>Gangguan Obesitas</li> </ol> <p>3) Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian Cidera</li> <li>Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas</li> <li>Penerapan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan</li> </ol> <p>E) Penyelamatan Lingkungan</p> <p>1) Penyelamatan Air dan Sanitasi Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan Kualitas Air Minum</li> <li>Sanitasi Total Berbasis Masyarakat</li> </ol> <p>2) Penyelamatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Higien sanitasi dan Bangunan Umum</li> <li>Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan</li> <li>Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum</li> </ol> <p>3) Penyelamatan Kawasan dan Sanitasi Darurat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penanggulangan kecuruturan bidang Kesehatan Lingkungan</li> <li>Facilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan</li> <li>Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat</li> <li>Penyelamatan kawasan dan sanitasi dasar</li> </ol> <p>4) Higien Sanitasi Pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Makanan Jajanan</li> <li>Restoran / Rumah Makan</li> <li>Jasa Boga</li> <li>Depot Air Minum</li> </ol> <p>5) Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Medis Fasyankes</li> </ol>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musrenah</p>	

1	2	3	4	5
<p>4</p> <p>GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK</p> <p>A Gizi</p> <p>1) Gizi Makro</p> <p>a Gerakan</p> <p>b Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu)</p> <p>2) Gizi Mikro</p> <p>a Upaya</p> <p>b Manajemen Taburia</p>	<p>F Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyakit Lingkungan</p> <p>1) Pengembangan Teknologi dan Laboratorium</p> <p>a Laboratorium Pengendali Penyakit</p> <p>b Laboratorium Kesehatan Lingkungan</p> <p>c Laboratorium Kesehatan Matra</p> <p>d Model dan Teknologi Tepat Guna</p> <p>e Uji kendali mutu dan kalibrasi</p> <p>f Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi</p> <p>G Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan</p> <p>1) Ship Sanitation</p> <p>a Ship Sanitation Control Exemption of Certificate (SSCEC)</p> <p>b Ship Sanitation Control of Certificate (SSCC)</p> <p>c Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal</p> <p>2) Sertifikat</p> <p>a Health Certificate</p> <p>b International Certificate of Vaccination</p> <p>c Surat Keretangan Pengujian Kesehatan Nakhoda/Plot dan Anak Buah Kapal/Pesawat</p> <p>d Sertifikat Air Bersih</p> <p>e Sertifikat Penyelenggaraan Perusahan Fumigasi di Kapal</p> <p>f Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga</p> <p>g Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan</p> <p>h Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan</p> <p>i Sertifikat ODP</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<p>c Upaya penanggulangan masalah gizi makro lainnya ( TTD )</p> <p>3) Gizi Kimik dan Dietetik</p> <p>a Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi</p> <p>b Tataaksana Anak Gizi Buruk</p> <p>c Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih</p> <p>4) Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan</p> <p>a Makanan Pendamping ASI</p> <p>b ASI Eksklusif</p> <p>c Pedoman Gizi Seimbang</p> <p>d Makanan Bayi dan Anak</p> <p>e Buffer Stock Makanan Pendamping ASI</p> <p>f Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang</p> <p>g Makanan Tambahan Anak Sekolah</p> <p>5) Kewaspadaan Gizi</p> <p>a Surveilans Gizi ( PSG )</p> <p>b Epidemiologi Kasus Gizi Buruk</p> <p>c Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana</p> <p>d Jejaring Informasi Pangan dan Gizi</p> <p>B Kesehatan Ibu</p> <p>1) Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>a Pelayanan Antenatal Terpadu</p> <p>b Pelayanan Kelas Ibu Hamil</p> <p>c Pencegahan Perularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)</p> <p>2) Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas</p> <p>a Kemitraan Bidan dan Dukun</p> <p>b Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)</p> <p>c Supervisi Fasitatif</p> <p>3) Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi</p> <p>a Audit Maternal Perinatal</p> <p>b Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan</p> <p>c Tanda Bahaya pada Kehamilan</p> <p>d Surveilans Kematian Ibu</p> <p>4) Keluarga Berencana</p> <p>a Belayaran KB Pasca Persalinan</p> <p>b Pelatihan KB Pasca Persalinan</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	

<p>5) Perlindungan Kesehatan Reproduksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT)</li> <li>Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM)</li> <li>Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan</li> <li>Pengarus Ujamaan Gender Bidang Kesehatan (PU/GBK)</li> </ol> <p>C Kesehatan Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kelangsungan Hidup Bayi       <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Kesehatan Neonatal</li> <li>Manajemen Asfeksia</li> <li>Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)</li> <li>Pencegahan Inteksi</li> </ol> </li> <li>Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah       <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan SDDTK (Stimulasi Dini Interferensi Deteksi Tumbuh Kembang)</li> <li>Rujukan Tumbuh Kembang</li> <li>Manajemen Terpadu Balita Sehat Berbasis Komputer (ICATT)</li> <li>Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko           <ol style="list-style-type: none"> <li>Screening Hypoterooid Congenital</li> <li>Surveilance Kesehatan Anak</li> <li>Surveilance Kesehatan Bawanan</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja       <ol style="list-style-type: none"> <li>Tempat Perunggan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit</li> <li>Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja</li> <li>Usaha Kesehatan Sekolah</li> </ol> </li> <li>Perlindungan Kesehatan Anak       <ol style="list-style-type: none"> <li>Korban kekerasan terhadap anak</li> <li>Anak dengan disabilitas</li> <li>Anak terantar/anak jalanan di panti</li> <li>Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan</li> <li>Anak kelompok terasing/kelompok minoritas</li> </ol> </li> </ol> <p>D Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kesehatan Tradisional Keterampilan       <ol style="list-style-type: none"> <li>Akupresure</li> <li>Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional</li> <li>Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Pasyankes</li> <li>Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya</li> </ol> </li> </ol>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5
<p>2) Kesehatan Tradisional Rannuan</p> <p>a Health Tourism</p> <p>b Peningkatan Pemanfaatan Tamam Obat Keluarga (TOGA)</p> <p>c Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)</p> <p>d Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional</p> <p>e Pelayanan Kesehatan Tradisional Rannuan di Fasyankes</p> <p>3) Kesehatan Alternatif dan Komplementer</p> <p>a Akupunktur</p> <p>b Obat Herbal / Obat Tradisional</p> <p>c Integrasi Yankestrad</p> <p>d Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya</p> <p>4) Penapisan dan Kemitraan</p> <p>a Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T)</p> <p>b Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer</p> <p>c Penapisan Pengobat Tradisional Asing</p> <p>d Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer</p> <p>e Pengobat Tradisional (Lokal)</p> <p>f Asosiasi Pengobat Tradisional</p> <p>E Kesehatan Kerja dan Olahraga</p> <p>1) Pelayanan Kesehatan Kerja</p> <p>a Penyakit Akibat Kerja</p> <p>b Pemeriksaan Kesehatan Pekerja</p> <p>c Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)</p> <p>2) Kapasitas Kerja</p> <p>a Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif</p> <p>b Kapasitas Kesehatan Kerja</p> <p>c TTP ASI</p> <p>3) Lingkungan Kerja</p> <p>a Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP</p> <p>b K3 Perkantoran</p> <p>c K3 Rumah Sakit</p> <p>d K3 Puskesmas</p> <p>e Biomonitoring Efek Kesehatan</p> <p>f Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan</p> <p>4) Kemitraan Kesehatan Kerja</p> <p>a Pengembangan ,Jahung Pembimbing Kesehatan Kerja</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5
<p>5 KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN</p> <p>A Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis, Pemantauan &amp; Evaluasi)</p> <p>1) Harga Obat Publik</p> <p>a Harga Jual Obat Generik</p> <p>b Harga Jual Obat Generik Berdagang</p> <p>c Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat</p> <p>2) Pengadaan Obat</p> <p>a Pengadaan Vaksin Reguler</p> <p>b Obat Esensial</p> <p>c Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional</p> <p>d Obat Program Malaria</p> <p>e Obat Program Kesehatan Anak</p> <p>f Obat Program Kesehatan Ibu</p> <p>g Obat Program Gizi</p> <p>h Obat Anti Tuberkulosis</p> <p>i Obat Program Percepatan Pembangunan Kesehatan Tanah Papua (P2KTP)</p> <p>j Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia</p> <p>k Obat Penderita Thalassaemia</p> <p>l Obat Psiko tropika Generik</p> <p>m Obat Anti Retro Viral</p> <p>3) Perbekalan Kesehatan</p> <p>a Gudang Farmasi</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5
	<p>b Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan</p> <p>c Pemurnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan</p> <p>d Pengadaan Reagen Screening Darah</p> <p>e Obat Buffer Stock</p> <p>f Hasil Stock Opname Obat</p> <p><b>B Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan</b></p> <p>1) Alat Kesehatan</p> <p>a Alat Kesehatan</p> <p>b Kependudukan Alat Kesehatan</p> <p>c Pelabelan Alat Kesehatan Dan PKRT</p> <p>d Post Market &amp; Surveillance Alat Kesehatan</p> <p>e Produk Alat Kesehatan Elektromedik</p> <p>f Produk Alat Kesehatan Non Elektromedik</p> <p>2) Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat</p> <p>a Industri Farmasi</p> <p>b Pedagang Besar Farmasi</p> <p>c Pedagang Eceran Obat</p> <p>d Penyalur Alat Kesehatan</p> <p>e Apotik</p> <p>f Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan</p> <p>3) Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)</p> <p>a Produk Diagnostik In Vitro</p> <p>b Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)</p> <p>c PKRT Kelas III</p> <p>d PKRT Kelas I dan II</p> <p>e Perusahaan Rumah Tangga PKRT</p> <p>f Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga</p> <p>g Post Market &amp; Surveillance PKRT</p> <p><b>B Kefarmasian (Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional)</b></p> <p>1) Pelayanan Kefarmasian</p> <p>a Visite untuk Apoteker</p> <p>b Tanggung Jawab Apoteker terhadap Keselamatan Pasien (Patient Safety)</p> <p>c Perubahan Resep</p> <p>2) Farmasi Klinik</p> <p>a Pharmaceutical Care untuk Penyakit Artritis Rematik</p> <p>b Pharmaceutical Care untuk Penyakit Asma</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5
<p>c Pharmaceutical Care untuk Penyakit Flu Burung</p> <p>d Pharmaceutical Care untuk Penyakit Hati</p> <p>e Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Mellitus</p> <p>f Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan</p> <p>g Pharmaceutical Care untuk Penyakit Tuberculosis</p> <p>h Pharmaceutical Care Lainnya</p> <p>i Dispensing Sediaan Steril</p> <p>j Pencampuran Obat Suntikan Penanganan Sediaan Sirostatika</p> <p>k Pharmaceutical Care untuk Pasien Penyakit Jantung Koroner : Fokus Sindrom Koroner</p> <p>3) Farmasi Komunitas</p> <p>a Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas</p> <p>b Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care)</p> <p>c Kefarmasian untuk Pasien Pediatri</p> <p>d Kefarmasian untuk Penyakit Malaria</p> <p>e Farmasi di Rumah Sakit</p> <p>4) Penggunaan Obat Rasional</p> <p>a Obat Rasional</p> <p>b Informasi Obat</p> <p>c Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik</p> <p>d Pemantauan Terapi Obat</p> <p>D Produk dan Distribusi Kefarmasian</p> <p>1) Obat Tradisional</p> <p>a Farmakope Indonesia</p> <p>b Farmakope Herbal Indonesia</p> <p>c Suplemen I Farmakope Indonesia</p> <p>d Suplemen II Farmakope Indonesia</p> <p>e Suplemen II Farmakope Indonesia</p> <p>f Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia</p> <p>g Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia</p> <p>h Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia</p> <p>m Farmakope Herbal Indonesia &amp; Suplemennya Versi Bahasa Inggris</p> <p>2) Kosmetik dan Makanan</p> <p>a Keamanan Pangan</p> <p>b Kosmetika bagi Petugas</p> <p>c Industri Rumah Tangga bagi Petugas</p> <p>d Makanan Jajanan Anak Sekolah</p> <p>e Kodeks Kosmetika Indonesia</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan divyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan divyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan divyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5
6	<p><b>f</b> Materi Kosmetika Bahan Alam Indonesia</p> <p>3) Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a Narkotika dan Psikotropika</li> <li>b Prekursor Farmasi</li> <li>c Sediaan Farmasi Khusus</li> <li>d Persetujuan Impor dan Ekspor</li> <li>e Pelaksanaan Perizinan Import dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi</li> </ol> <p>4) Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a Indonesian Pharmaceutical Industry Directory</li> </ol>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
7	<p><b>SURAT KETERANGAN, SERTIFIKASI DAN PERJINAN</b></p> <p><b>A Surat Keterangan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Keterangan Special Access Scheme (SAS )</li> <li>2) Surat Keterangan Special Access Scheme (SAS )</li> <li>3) Surat Keterangan Alat Kesehatan</li> <li>4) Sertifikasi Produksi PKRT</li> <li>5) Surat Keterangan PKRT</li> </ol> <p><b>B Sertifikasi dan Perjinan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan</li> <li>2) Sertifikasi Sarana Distribusi Alat Kesehatan</li> <li>3) Perjinan Dan Pengawasan Alat Kesehatan</li> <li>4) Perjinan Penyalur Alat Kesehatan</li> </ol>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
7	<p><b>PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN</b></p> <p><b>A Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pencegahan dan Mitigasi</li> <li>2) Kesiapsiagaan</li> </ol> <p><b>B Tanggap Darurat dan Pemulihan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tanggap Darurat</li> <li>2) Pemulihan</li> </ol> <p><b>C Pemantauan dan Informasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemantauan</li> <li>2) Informasi</li> </ol> <p><b>D Penanggulangan</b></p> <p><b>E Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana</b></p>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
8	PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN  A Tersedianya data NHA Setiap Tahun B Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
9	INTELIJENSI KESEHATAN  A Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelligensi Kesehatan 1) Intelligensi Anak 2) Intelligensi Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia B Peningkatan Masalah Intelligensi Kesehatan 1) Intelligensi Akibat Gangguan Bawaan 2) Intelligensi Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
10	KESEHATAN HAJI  A Pelayanan dan penguatan sumber daya kesehatan haji 1) Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji 2) Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji kab/kota 3) Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debarokasi atau KKP 4) Pelayanan Kesehatan Embarkasi 5) Rekrutimen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 6) Rekrutimen Tenaga Musiman B Peningkatan 1) Advokasi dan Komitmen Pembinaan Kesehatan Haji 2) Kesehatan Haji di Kab/kota 3) Kesehatan Haji Terpadu 4) Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji 5) Vaksinasi jamaah Haji 6) Sanitasi Asrama Haji 7) Penyelenggara	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
11	PROMOSI KESEHATAN  A Sarana Promosi Kesehatan 1) Booklet 2) Poster 3) Leaflet 4) Pamflet	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
<p>5) Lember Balik</p> <p>6) Selebaran</p> <p>7) Buletin</p> <p>8) Festival</p> <p>9) Lomba</p> <p>10) Pameran</p> <p>11) Seminar</p> <p>12) Iklan Layanan Masyarakat</p> <p>13) Film</p> <p>14) Radio Spot</p> <p>H Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran</p> <p>1) Saka Bhakti Husada</p> <p>2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>3) Lembaga Sosial/Organisasi Masyarakatan di Bidang Kesehatan</p> <p>4) Kawasari Tanpa Rokok</p> <p>5) Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan</p> <p>6) Kemirraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan</p> <p>7) Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan</p> <p>8) Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung Kesehatan Ibu dan Anak</p> <p>C Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan</p> <p>1) Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan</p> <p>2) Kampanye Promosi Kesehatan</p> <p>3) Video Animasi Promosi Kesehatan</p> <p>D Hari Kesehatan</p> <p>1) Hari Kesehatan Nasional</p> <p>2) Hari Kesehatan Dunia</p> <p>4) Hari tanpa Tembakau se-Dunia</p> <p>5) Hari-hari Besar Kesehatan</p> <p>12 KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA</p> <p>A Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi</p>	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	



1	2	3	4	5
	<p>B. Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta</li> <li>2 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta</li> <li>3 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta</li> <li>b. Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta</li> </ol> </li> </ol> <p>C. Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan</li> <li>b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan</li> </ol> </li> <li>2 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan</li> <li>b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan</li> </ol> </li> <li>3 Kesertaan keluarga berencana pria               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan akses keluarga berencana pria</li> <li>b. Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria</li> </ol> </li> </ol> <p>D. Kesehatan Reproduksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak</li> </ol>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<p>2 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS</p> <p>3 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas</p> <p>Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga</p> <p>A. Bina keluarga Balita dan Anak</p> <p>1 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak</p> <p>a. Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak</p> <p>b. Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak</p> <p>2 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak</p> <p>a. Monitoring bina keluarga Balita dan anak</p> <p>b. Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak</p> <p>B. Bina ketahanan remaja</p> <p>1 Pelembagaan bina ketahanan remaja</p> <p>a. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan</p> <p>b. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat</p> <p>2 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja</p> <p>a. Monitoring bina ketahanan remaja</p> <p>b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja</p> <p>C. Bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan</p> <p>1 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan</p> <p>a. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia</p> <p>b. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5
	<p>2. Peningkatan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan</p> <p>a. Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan</p> <p>b. Pengembangan Komunitas Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan</p> <p>a. Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan</p> <p>b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan</p> <p>D. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga</p> <p>1. Pengembangan program usaha ekonomi keluarga</p> <p>2. Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga</p> <p>3. Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga</p> <p>a. Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga</p> <p>b. Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga</p> <p>E. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera</p> <p>1. Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>2. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera</p> <p>a. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera</p> <p>b. Pengembangan Komitran Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera</p> <p>3. Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera</p> <p>a. Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera</p> <p>b. Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera</p> <p>Advokasi dan Informasi</p> <p>A. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi</p> <p>1. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi</p> <p>a. Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi</p> <p>b. Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi</p> <p>2. Advokasi dan pencitraan</p> <p>3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi</p> <p>a. Promosi</p> <p>b. Sarana produksi media komunikasi</p> <p>c. Produk media komunikasi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

**B. Bina hubungan antar lembaga**

1. Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
2. Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
  - a. Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
  - b. Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
3. Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
  - a. Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
  - b. Penguatan hubungan dengan lembaga non pemerintah

**C. Bina lini lapangan**

1. Tenaga lini lapangan
  - a. Pengembangan tenaga lini lapangan
  - b. Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
2. Instansi Masyarakat Pedesaan
  - a. Pengembangan instansi masyarakat pedesaan
  - b. Monitoring dan evaluasi instansi masyarakat pedesaan
3. Mekanisme Operasional lini lapangan
  - a. Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
  - b. Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan

	3	4	5
<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	
<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	
<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	
<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	
<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	
<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	
<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	
<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	
<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	
<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	
<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	



1	2	3	4	5
	3 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumentasi dan perpustakaan</li> <li>b. Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi</li> </ul>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
<b>XVI</b>	<b>URUSAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>			
1	Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan bidang               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pengkajian dan pengusunan kebijakan</li> <li>2 Penyajian kebijakan</li> <li>3 Perumusan kebijakan</li> <li>4 Masukan dan dukungan kebijakan</li> <li>5 Penetapan NSPK</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	Pengendalian Penduduk <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan dan Pengolahan Data</li> <li>b. Evaluasi dan Pelaporan</li> </ul> </li> <li>2 Fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyajian fasilitas</li> <li>b. Evaluasi dan pelaporan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Musnah  Permanen  Musnah  Permanen

B. Perencanaan pengendalian penduduk	1 Profil dan Proyeksi Penduduk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Data profil dan proyeksi Penduduk b. Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Penetapan parameter pengendalian penduduk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	a. Penetapan sasaran parameter b. Evaluasi sasaran parameter	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Pemanfaatan profil dan proyeksi b. Pemanfaatan Parameter	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Kerja sama pendidik kependudukan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1 Pengembangan sistem	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Pengembangan sistem jalur pendidikan formal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan jalur pendidikan nonformal dan informal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Pengembangan Materi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Pengembangan materi jalur pendidikan formal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan materi jalur pendidikan nonformal dan informal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Monitoring dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan formal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan nonformal dan informal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
<p>D Analisis dampak kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Analisis Sosial</li> <li>2 Analisis Ekonomi</li> <li>3 Analisis dampak politik, pertahanan, dan keamanan</li> <li>4 Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan</li> </ol> <p>3</p> <p>Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</p> <p>A. Bina kesetiaan keluarga berencana jalur pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah</li> <li>2 Jaminan pelayanan dan penyelesaian sarana keluarga berencana</li> <li>3 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah</li> <li>b. Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah</li> </ol> </li> </ol>		<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	<p>Musnah</p>	
<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	<p>Musnah</p>	
<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	<p>Permanen</p>	

1	2	3	4	5
1	<p>B. Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta</li> <li>2 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta</li> <li>3 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta</li> <li>b. Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta</li> </ol> </li> </ol> <p>C. Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan</li> <li>b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan</li> </ol> </li> <li>2 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan</li> <li>b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan</li> </ol> </li> <li>3 Kesertaan keluarga berencana pria         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan akses keluarga berencana pria</li> <li>b. Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria</li> </ol> </li> </ol> <p>D. Kesehatan Reproduksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak</li> <li>2 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS</li> </ol>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
4	<p>3 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas</p> <p>Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga</p> <p>A. Bina keluarga Balita dan Anak</p> <p>1 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak</p> <p>a. Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak</p> <p>b. Pengembangan kemahiran bina keluarga dan anak</p> <p>2 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak</p> <p>a. Monitoring bina keluarga Balita dan anak</p> <p>b. Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak</p> <p>E. Bina ketahanan remaja</p> <p>1 Pelembagaan bina ketahanan remaja</p> <p>a. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan</p> <p>b. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat</p> <p>2 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja</p> <p>a. Monitoring bina ketahanan remaja</p> <p>b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja</p> <p>C. Bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan</p> <p>1 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan</p> <p>a. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia</p> <p>b. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>2. Pengembangan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan</li> <li>b. Pengembangan Kontraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan</li> </ol> <p>3. Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan</li> <li>b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan</li> </ol> <p>D. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan program usaha ekonomi keluarga</li> <li>2. Peningkatan teknologi dan permukiman usaha ekonomi keluarga</li> <li>3. Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga</li> <li>b. Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga</li> </ol> </li> <li>4. Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga</li> </ol> <p>E. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera</li> </ol>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>2. Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera</p> <p>a. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera</p> <p>b. Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera</p> <p>3. Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera</p> <p>a. Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera</p> <p>b. Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera</p> <p>5. Advokasi dan Informasi</p> <p>A. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi</p> <p>1. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi</p> <p>a. Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi</p> <p>b. Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi</p> <p>2. Advokasi dan pencitraan</p> <p>3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi</p> <p>a. Promosi</p> <p>b. Sarana produksi media komunikasi</p> <p>C. Produk media komunikasi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<p>B. <b>Hubungan antar lembaga</b></p> <p>1 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi</p> <p>2 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota</p> <p>a. Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota</p> <p>b. Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota</p> <p>3 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah</p> <p>a. Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah</p> <p>b. Penguatan hubungan dengan lembaga non pemerintah</p> <p>C. <b>Bina lini lapangan</b></p> <p>1 <b>Tenaga lini lapangan</b></p> <p>a. Pengembangan tenaga lini lapangan</p> <p>b. Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan</p> <p>2 <b>Institusi Masyarakat Pedesaan</b></p> <p>a. Pengembangan institusi masyarakat pedesaan</p> <p>b. Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan</p> <p>3 <b>Mekanisme Operasional lini lapangan</b></p> <p>a. Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan</p> <p>b. Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan</p>		<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
		<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
		<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
		<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
1	<p>D. Pelaporan dan statistik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan</li> <li>b. Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan</li> </ol> </li> <li>2. Pengumpulan dan pengolahan data</li> <li>3. Analisis dan evaluasi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk</li> <li>b. Analisa dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera</li> </ol> </li> <li>E. Teknologi Informasi dan Dokumentasi               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem aplikasi dan bank data                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan sistem aplikasi</li> <li>b. Pengelolaan bank data</li> </ol> </li> <li>2. Infrastruktur teknologi informasi                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi</li> <li>b. Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>3 Dokumentasi dan penyebaran informasi</p> <p>a. Dokumentasi dan perputakaan</p> <p>b. Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p><b>XVII</b></p>	<p><b>SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b></p> <p>1 Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Promosian Pariwisata, Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK, dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi:</p> <p>1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan</p> <p>2 Penyajian kebijakan</p> <p>3 Perumusan dan penyusunan bahan</p> <p>4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>5 Penetapan dalam bentuk NSPK</p>	<p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>2 <b>PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b></p> <p>A. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata</p> <p>1 Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata)</p> <p>2 Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata)</p> <p>3 Pengembangan Zona Kreatif</p> <p>a. Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya</p> <p>b. Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK</p> <p>4 Investasi Pariwisata</p> <p>a. Pengembangan Potensi Investasi</p> <p>b. Promosi Investasi</p> <p>B. Pengembangan Daya Tarik Wisata</p> <p>1 Bimtek Daya Tarik Wisata</p> <p>2 Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>3 Pengembangan daya tarik wisata kota pusaka</p> <p>4 Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan</p> <p>5 Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award)</p> <p>C. Industri Pariwisata</p> <p>1 Sarana Pariwisata</p> <p>a. usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata</p> <p>b. penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa.</p> <p>2 Jasa Pariwisata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jasa transportasi wisata</li> <li>- jasa informasi pariwisata</li> <li>- penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>- jasa perjalanan wisata</li> <li>- jasa konnulan pariwisata</li> <li>- jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan</li> <li>- insentif</li> <li>- konvensi</li> <li>- pameran</li> </ul> <p>3 Pengembangan Produk dan Pelayanan</p> <p>D. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata</p> <p>1 Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
<p>2 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa</p> <p>3 Kemitraan dan Kелembagaan Masyarakat</p> <p>E. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pengembangan Wisata Kulher dan Belanja</li> <li>2 Pengembangan Rekreasi dan Hiburan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Wisata Spe dan Kesehatan</li> <li>b. Pengembangan Wisata Olah Raga</li> </ol> </li> <li>3 Pengembangan Wisata Alam dan Budaya</li> <li>4 Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif dan Event</li> </ol>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>	
<p>3 PEMASARAN PARIWISATA</p> <p>A. Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Informasi Pasar Dalam Negeri               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri</li> <li>b. Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri</li> </ol> </li> <li>2 Informasi Pasar Luar Negeri               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri</li> <li>b. Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri</li> </ol> </li> <li>3 Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hubungan Lembaga Pariwisata</li> <li>b. Widya Wisata</li> </ol> </li> <li>4 Perancangan Pemasaran Pariwisata               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perancangan Pemasaran Dalam Negeri</li> <li>b. Perancangan Pemasaran Luar Negeri</li> </ol> </li> </ol>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>	

1	2	3	4	5
<p>4 EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA</p> <p>A. Pengembangan Industri Perfilman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas Industri Perfilman               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitas Usaha Perfilman</li> <li>b. Fasilitas Kegiatan Perfilman</li> </ol> </li> <li>2. Festival dan Ekstensi Film               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Festival Film</li> <li>b. Ekstensi Film</li> </ol> </li> <li>3. Produksi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Konten dan Lokasi Film</li> <li>b. Pelayanan Produksi Film</li> </ol> </li> <li>4. Pemasaran Film               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Distribusi Film</li> <li>b. Pertunjukan Film</li> </ol> </li> </ol> <p>B. Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Seni Pertunjukan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kreasi dan Produksi Seni Pertunjukan</li> <li>b. Fasilitas Pengembangan Seni Pertunjukan</li> </ol> </li> <li>2. Pengembangan Industri Musik               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kreasi dan Produksi Musik</li> <li>b. Fasilitas Pengembangan Industri Musik</li> </ol> </li> <li>3. Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik</li> <li>4. Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik</li> </ol>		<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
<p>C. Pengembangan Seni Rupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan, Fotograf</li> <li>2 Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Distribusi dan Komersialisasi Karya Seni Rupa</li> <li>b. Apresiasi Karya Seni Rupa</li> </ol> </li> </ol>	<p>a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertunjukan b. Dokumentasi dan Publikasi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>5 EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN, DAN IPTEK</p> <p>A. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pengembangan Film Animasi dan Komik</li> <li>2 Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi</li> <li>3 Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video</li> <li>4 Pengembangan Karya Kreatif Periklanan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Iklan Cetak</li> <li>b. Iklan Elektronik</li> </ol> </li> </ol> <p>B. Desain dan Arsitektur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Arsitektur dan Desain Interior</li> <li>2 Komunikasi Visual               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Desain Grafis</li> <li>b. Komunikasi Visual</li> </ol> </li> <li>3 Desain Produk dan Kemasan</li> <li>4 Mode               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Desain Busana</li> <li>b. Desain Non Busana</li> </ol> </li> </ol> <p>C. Kerjasama dan Fasilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Lisensi Teknologi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Teknologi</li> <li>b. Pemanfaatan Teknologi</li> </ol> </li> </ol>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>2 Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis</p> <p>a. Pengembangan Sentra Inovasi</p> <p>b. Pengembangan Inkubator Bisnis</p> <p>3 Sentra Kreatif</p> <p>a. Pengembangan Sentra Kreatif</p> <p>b. Pengelolaan Sentra Kreatif</p> <p>4 Akses Pembiayaan</p> <p>a. Akses Pembiayaan Bank</p> <p>b. Akses Pembiayaan Non Bank</p> <p>6 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</p> <p>A. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Keperawatan</p> <p>1 Program dan Evaluasi</p> <p>2 Data dan Publikasi</p> <p>B. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif</p> <p>1 Program dan Evaluasi</p> <p>2 Data dan Publikasi</p> <p>C. Pengembangan SDM Keperawatan dan Ekonomi Kreatif</p> <p>1 Program dan Evaluasi</p> <p>2 Penyelenggaraan dan Kerjasama</p> <p>D. Kompetensi Keperawatan dan Ekonomi Kreatif</p> <p>1 Program dan Evaluasi</p> <p>2 Evaluasi dan Kerjasama</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
<b>XVIII</b>	<b>SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN SOSIAL</b>			
1	<p>Kebijakan</p> <p>Kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan.</p> <p>1 Pengkajian dan penyusunan kebijakan</p> <p>2 Penyusunan kebijakan</p> <p>3 Perumusan kebijakan</p> <p>4 Masukan dan dukungan kebijakan</p>	<p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
<p>5. Penetapan NSPK</p> <p>2. Rehabilitasi Sosial</p> <p>Kesejahteraan sosial anak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesejahteraan Sosial Anak Balita               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengangkatan Anak</li> <li>b. Pengasuhan Anak Balita</li> </ol> </li> <li>2. Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengasuhan Anak dalam Keluarga</li> <li>b. Pengasuhan Anak dalam Lembaga</li> </ol> </li> <li>3. Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum</li> <li>b. Pengembangan Remaja</li> </ol> </li> <li>4. Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelembagaan dan Penguatan Keluarga</li> <li>b. Aksesibilitas Anak dengan Kecacatan</li> </ol> </li> <li>5. Kesejahteraan Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelembagaan Perlindungan Anak</li> <li>b. Advokasi dan Perlindungan Khusus</li> </ol> </li> </ol> <p>Rehabilitasi Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam Panti</li> <li>b. Luar Panti</li> </ol> </li> <li>2. Kelembagaan dan advokasi sosial</li> <li>3. Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial</li> </ol>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	
	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	
	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	
	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5
	<p>Rehabilitasi sosial tuna sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Gelandangan, pengemis dan pemulung</li> <li>2 Tuna susila dan korban trafficking perempuan</li> <li>3 Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Penyisipan</li> <li>b Reintegrasi</li> </ol> </li> <li>4 Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas</li> </ol> <p>Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat</li> <li>2 Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi</li> </ol> <p>Pelayanan sosial lanjut usia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pelayanan sosial dalam dan luar parti</li> <li>2 Pengembangan kelermbagaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Pembinaan Lembaga</li> <li>b Kerjasama Lembaga</li> </ol> </li> <li>3 Advokasi dan pelayanan sosial keclaturatan</li> </ol> <p>3 Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bimbingan dan standarisasi</li> <li>2 Perizinan dan pengumpulan</li> </ol>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Perlindungan sosial korban tindak kekerasan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Pemulihan sosial</li> <li>b Pemulangan dan Reintegrasi</li> </ol> </li> <li>2 Perlindungan sosial pekerja migran               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Penampungan dan pemulihan sosial</li> <li>b Pemulangan dan Reintegrasi</li> </ol> </li> <li>3 Evaluasi dan pelaporan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Kerjasama</li> <li>b Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</li> </ol> </li> </ol> <p>Perlindungan sosial korban bencana sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ketahanan sosial masyarakat               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Keserasian sosial</li> <li>b Penguatan Sumber Daya</li> </ol> </li> <li>2 Tanggap Darurat               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Bantuan Darurat</li> <li>b Advokasi sosial</li> </ol> </li> <li>3 Pemulihan sosial               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Penguatan sosial</li> <li>b Reintegrasi sosial</li> </ol> </li> <li>4 Kerja sama               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Kerja sama pemerintah</li> <li>b Kerja sama non pemerintah</li> </ol> </li> </ol> <p>Perlindungan sosial korban bencana alam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kesiapsiagaan dan mitigasi</li> <li>2 Tanggap darurat               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Bantuan darurat</li> <li>b Advokasi Sosial</li> </ol> </li> <li>3 Pemulihan sosial dan penguatan sosial</li> <li>4 Kerja sama               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Kerja sama pemerintah</li> <li>b Kerja sama Non Pemerintah</li> </ol> </li> </ol>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
	<p>Perlindungan sosial korban bencana alam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kesiapsiagaan dan mitigasi</li> <li>2 Tanggap darurat               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Bantuan darurat</li> <li>b Advokasi Sosial</li> </ol> </li> <li>3 Pemulihan sosial dan penguatan sosial</li> <li>4 Kerja sama               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Kerja sama pemerintah</li> <li>b Kerja sama Non Pemerintah</li> </ol> </li> </ol>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
Jaminan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seleksi dan verifikasi</li> <li>2 Asuransi kesejahteraan sosial               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Kelembagaan</li> <li>b Pengelolaan premi</li> </ol> </li> <li>3 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Pendampingan</li> <li>b Penyaluran</li> </ol> </li> <li>4 Kerja sama               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Kerja sama pemerintah</li> <li>b Kerja sama Non Pemerintah</li> </ol> </li> </ol>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>8 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>4 Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan</li> </ol>	<p>Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Keluarga keluarga           <ol style="list-style-type: none"> <li>a Bimbingan kesejahteraan sosial keluarga</li> <li>b Konsultasi dan advokasi keluarga</li> </ol> </li> <li>2 Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan</li> <li>3 Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial</li> <li>4 Kemiripan dunia usaha           <ol style="list-style-type: none"> <li>a Kerja sama</li> <li>b Bimbingan Sosial</li> </ol> </li> <li>5 Karang Taruna           <ol style="list-style-type: none"> <li>a Kelembagaan</li> <li>b Pengembangan Kapasitas</li> </ol> </li> </ol> <p>Pemberdayaan komunitas adat terpencil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Persiapan pemberdayaan           <ol style="list-style-type: none"> <li>a Identifikasi</li> <li>b Analisis</li> </ol> </li> <li>2 Pemberdayaan sumber daya manusia           <ol style="list-style-type: none"> <li>a Pemberdayaan sumber daya manusia adat terpencil</li> <li>b Pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil</li> </ol> </li> <li>3 Penggalian dan pengembangan potensi           <ol style="list-style-type: none"> <li>a Penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan</li> <li>b Pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan</li> </ol> </li> <li>4 Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil</li> </ol>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>a Keserasian sosial b penguatan sosial</p> <p>5 Kerja sama kelembagaan a Kerja sama kelembagaan b Pemantauan, evaluasi dan pelaporan</p> <p>Pemanggungan kemiskinan perkotaan dan Perdesaan</p> <p>1 Identifikasi dan analisis</p> <p>2 Pengembangan kapasitas a Pengembangan kapasitas sumber daya manusia b Pengembangan kapasitas usaha</p> <p>3 Penataan sosial lingkungan kumuh a Bimbingan sosial b Pengembangan lingkungan sosial</p> <p>4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas a Advokasi sosial b Pengembangan aksesibilitas</p> <p>Kepahlawanan, keperintisan dan kesetia-kawanan sosial</p> <p>1 Penghormatan dan kesejahteraan keluarga pahlawan a Penghormatan b Penghargaan c Kesejahteraan</p> <p>2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan a Identifikasi b Pendayagunaan</p> <p>3 Pengembangan kesetiakawanan sosial a pengesajian nilai b Pelestarian nilai</p> <p>4 Pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional a Pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama b Standardisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>8 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<b>XIX</b>	<b>URUSAN KEARSIPAN</b>			
1	Kebijakan  Kebijakan tentang pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip a Pengkajian dan pengusulan kebijakan b Penyajian kebijakan c Perumusan kebijakan d Penetapan NSPK	3 Tahun sejak penelapan keputusan yang terbaru	2 Tahun	Permanen
2	Pembinaan Kearsipan  a Akreditasi kearsipan; lembaga kearsipan, unit kearsipan, lembaga penyelenggara jasa kearsipan dan diklat kearsipan  - Proses Akreditasi  - Berkas Penetapan Sertifikasi Akreditasi  - Data Base Akreditasi  b Sertifikasi Arsiparis  - Proses Sertifikasi Arsiparis  - Berkas Penetapan Sertifikasi Arsiparis  - Data Base Sertifikasi Arsiparis	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun  2 Tahun  2 Tahun	Musnah  Permanen  Permanen
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
c	<p>Bina Arsiparis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Profesi Arsiparis               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formasi Jabatan Arsiparis</li> <li>- Standar Kompetensi Arsiparis</li> </ul> </li> <li>- Bimbingan Konsultasi Arsiparis</li> <li>- Pelatihan Arsiparis</li> <li>- Pemulihan Arsiparis Teladan</li> <li>- Penyelenggaraan</li> <li>- Berkas Penetapan Arsiparis Teladan</li> <li>- Data Base Arsiparis</li> </ul> <p>Bimbingan dan Konsultasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Akses Keamanan)</li> <li>- Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan</li> <li>- Unit Kearsipan</li> <li>- Sumberdaya Manusia</li> </ul> <p>Supervisi dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
d	<p>Bimbingan dan Konsultasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Akses Keamanan)</li> <li>- Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan</li> <li>- Unit Kearsipan</li> <li>- Sumberdaya Manusia</li> </ul> <p>Supervisi dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
e	<p>Supervisi dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan</li> <li>- Laporan hasil supervisi dan Evaluasi</li> </ul>	<p>F Pasiifasi Kearsipan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM Kearsipan</li> <li>- Prasarana dan Sarana</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
<p>E Lembaga/Unit Kearsipan Terbaik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan</li> <li>- Berkas Penertajan Lembaga/Unit Kearsipan Terbaik</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>	
<p>h Jadwal retensi arsip</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>Permanen</p>		

1	2	3	4	5
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Base Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Revisi Arsip</li> </ul> <p>Pengelolaan Arsip</p> <p>A Pengelolaan arsip dinamis</p> <p>1 Penciptaan</p> <p>a Pencatatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Agenda</li> <li>- Kartu Kendali</li> <li>- Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi</li> </ul> <p>b Pendistribusian</p> <p>2 Penggunaan</p> <p>a Pengklasifikasian Penggunaan dan Akses Arsip</p> <p>b Penyimpanan</p> <p>3 Pemeliharaan</p> <p>a Pemberkasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar arsip aktif (Daftar berkas dan isi berkas)</li> </ul> <p>b Penataan Arsip Inaktif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan fisik</li> <li>- Pengolahan informasi arsip</li> <li>- Penyusunan Daftar arsip inaktif</li> </ul> <p>c Penyimpanan arsip</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
<p>- Skema penyimpanan arsip aktif dan in aktif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengamanan</li> <li>- Alih Media               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketjyakan alih media</li> <li>- Autentikasi</li> <li>- Berita acara</li> </ul> </li> <li>- Daftar arsip yang alih mediakan               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Arsip vital                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi</li> <li>- Pelindungan dan Pengamanan</li> <li>- Penyelamatan dan pemulihan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>	
<p>4 Autentikasi Arsip Dinamis</p> <p>Autentikasi Pembuktian Autentikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b Pendapat tenaga ahli</li> <li>c Pengujian</li> <li>d Penetapan autentikasi arsip statis/surat pernyataan Pencipta Arsip</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>	
<p>5 Penyusutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Pemindahan Arsip Inaktif               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita acara Pemindahan</li> <li>- Daftar arsip yang di pindahkan</li> </ul> </li> <li>b Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitia penilai</li> <li>- Penilaian Panitia penilai</li> <li>- Permintaan persetujuan</li> <li>- Penetapan arsip yang dimusnahkan</li> <li>- Berita acara Pemusnahan arsip</li> <li>- Daftar arsip yang dimusnahkan</li> </ul> </li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>	

1	2	3	4	5
c	Penyerahan arsip statis <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Panitia penilai</li> <li>- Notulen Rapat Panitia</li> <li>- Surat pertimbangan Panitia penilai</li> <li>- Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan</li> <li>- Surat pernyataan autentik.</li> <li>- Keputusan Penetapan Penyerahan</li> <li>- Berita acara Penyerahan arsip               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar arsip yang diserahkan</li> </ul> </li> </ul>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
d	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Base Pengelolaan Arsip Aktif</li> <li>- Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif</li> </ul>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
B	Pengelolaan arsip statis <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Akuisisi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a Monitoring fisik dan daftar</li> <li>b Verifikasi terhadap daftar arsip</li> <li>c Menetapkan status arsip statis</li> <li>d Persetujuan untuk Penyerahan</li> </ol> </li> </ol>	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	<p>c Menyusun Sarana Bantu Temu Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guide</li> <li>- Daftar arsip Statis</li> <li>- Inventaris arsip Statis</li> </ul> <p>6 Preservasi</p> <p>a Preventif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyimpanan</li> <li>- Pengendalian hama terpadu</li> <li>- Reproduksi (alih media)               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara alih media</li> <li>2. Daftar Arsip yang dialih mediakan</li> </ol> </li> <li>- Perencanaan dan Penanggulangan Bencana</li> </ul> <p>b Kuratif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perawatan arsip</li> </ul> <p>c Laporan hasil Pengujian Mutu Preservasi</p> <p>7 Autentikasi Arsip Statis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuktian Autentisitas</li> <li>- Pendapat tenaga ahli</li> <li>- Pengujian</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

<p style="text-align: center;">- Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan</p> <p>8 Akses Arsip Statis</p> <p>a Layanan Arsip</p> <p>b Penerbitan Naskah Sumber</p> <p style="padding-left: 40px;">- Administrasi dan proses penyusunan</p> <p style="padding-left: 40px;">- hasil naskah sumber arsip</p> <p>c Pameran arsip</p> <p>9 Jasa Kearsipan</p> <p>a Konsultasi Kearsipan</p> <p>b Manual Kearsipan</p> <p>c Penataan Arsip</p> <p>d Otomasi Kearsipan</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>e Penyimpanan Arsip</p> <p>f Perawatan dan Pemeliharaan Arsip</p> <p>g Data Base Jasa Kearsipan</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah data diperbaharui</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
<b>XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
	<p><b>A. KEHLIAKAN</b></p> <p>Kebijakan dan standarisasi teknis di bidang politik dan dalam negeri, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, bina pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta keuangan daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan</li> <li>2. Penyusunan Kebijakan</li> <li>3. Perumusan Kebijakan</li> <li>4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)</li> <li>5. MOU</li> </ol> <p><b>B. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketahanan Ideologi Negara                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a.1. Penguatan ideologi negara</li> <li>a.2. Implementasi ideologi negara</li> </ol> </li> <li>b. Wawasan Kebangsaan                 <ol style="list-style-type: none"> <li>b.1. Penguatan wawasan kebangsaan</li> <li>b.2. Pembinaan dan sosialisasi</li> <li>b.3. Implementasi</li> </ol> </li> <li>c. Bela Negara                 <ol style="list-style-type: none"> <li>c.1. Pendidikan bela negara</li> <li>c.2. Pemberdayaan bela negara</li> </ol> </li> <li>d. Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan</li> </ol> </li> </ol>	<p>1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>d.1. Penguatan nilai-nilai sejarah</p> <p>d.2. Implementasi nilai-nilai sejarah</p> <p>d.3. Penerbitan rekomendasi penelitian</p> <p>e. Pembauran dan Kewarganegaraan</p> <p>e.1. Pembinaan pembauran kebangsaan</p> <p>e.2. Pembinaan kewarganegaraan</p> <p>2. Kewaspadaan Nasional</p> <p>a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan</p> <p>b. Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan</p> <p>c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan</p> <p>d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial</p> <p>    Pedoman kewaspadaan nasional</p> <p>e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing</p> <p>e.1. Pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing</p> <p>e.2. Patalu pemberitahuan penelitian orang asing</p> <p>3. Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan</p> <p>a. Ketahanan Seni</p> <p>a.1. Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian</p> <p>a.2. Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian</p> <p>b. Ketahanan Budaya</p> <p>b.1. Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan</p> <p>b.2. Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan</p> <p>c. Agama dan Kepercayaan</p> <p>c.1. Fasilitasi</p> <p>c.2. Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

		3	4	5
	<p>c.3. Pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan</p> <p>c.4. Pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan</p> <p>d. Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>d.1. Pelaksanaan identifikasi dan komplasi organisasi masyarakat</p> <p>d.1.1. Pendaftaran Ormas</p> <p>d.1.2. Database Ormas</p> <p>d.2. Laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/LNL</p> <p>d.3. Evaluasi aktifitas Ormas : sanksi administrasi</p> <p>d.4. Fasilitas sengketa Ormas</p> <p>d.5. Fasilitas Ormas</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

<p>c. Masalah sosial Kemasyarakatan</p> <p>e.1. Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika</p> <p>e.2. Masalah sosial kemasyarakatan</p> <p>4. Politik Dalam Negeri</p> <p>a. Implementasi Kebijakan Politik</p> <p>a.1. Implementasi kebijakan politik Sosialisasi dan publikasi best practise dan inovasi</p> <p>a.2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi</p> <p>b. Fasilitasi Kelengkapan Politik Pemerintahan</p> <p>b.1. Evaluasi kelengkapan politik pemerintahan di pusat Pendampingan kunjungan kerja DPR-RI</p> <p>b.2. Evaluasi kelengkapan politik pemerintahan daerah Orientasi anggota DPRD Provinsi</p> <p>c. Fasilitasi Kelengkapan Partai Politik</p> <p>c.1. Verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi</p> <p>c.2. Partai politik yang tidak memperoleh kursi</p> <p>c.3. Pemerintah daerah</p> <p>c.4. Database parpol</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
---	---	---	---

1	2	3	4	5
	<p>d. Pendidikan Budaya Politik</p> <p>d.1. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik</p> <p>d.2. Penyelenggaraan pendidikan budaya politik</p> <p>d.3. Modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan</p> <p>e. Pemilihan Umum</p> <p>e.1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu</p> <p>e.2. Evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat</p> <p>e.3. Evaluasi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden</p> <p>e.4. Laporan hasil perkembangan politik di daerah</p> <p>e.5. Laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL</p> <p>5. Ketahanan Ekonomi</p> <p>a. Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesejahteraan Perekonomian</p> <p>a.1. Fasilitasi ketahanan di bidang sumberdaya alam Sosialisasi dan publikasi best practise dan inovasi</p> <p>a.2. Peningkatan kesenjangan perekonomian</p> <p>b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter</p> <p>b.1. Fasilitasi identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi fiskal dan moneter</p> <p>b.2. Penyediaan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi</p> <p>c. Perilaku Perekonomian Masyarakat</p> <p>c.1. Pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian</p> <p>c.2. Evaluasi citra produk dalam negeri dan perlindungan konsumen</p> <p>d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi</p> <p>d.1. Evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama pengamanan kejahatan lembaga perekonomian</p> <p>d.2. evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian</p> <p>C. PEMERINTAHAN UMUM</p> <p>1. Dekonsentrasi dan Kerjasama</p> <p>a. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>b. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah</p> <p>c. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah</p> <p>d. Fasilitasi Kecamatan</p> <p>d.1. Fasilitasi</p> <p>Database pembentukan kecamatan</p> <p>d.2. Koordinasi</p> <p>d.3. Pembinaan dan pengawasan</p> <p>d.4. Monitoring dan evaluasi</p> <p>e. Fasilitasi Pelayanan Umum</p> <p>e.1. Fasilitasi pelayanan administrasi Kecamatan</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

	3	4	5
<p>e.2. Koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan</p> <p>e.3. Pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi Kecamatan</p> <p>e.4. Monitoring dan evaluasi</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
<p>2. Wilayah Administrasi dan Perbatasan</p> <p>a. Toponimi dan Data Wilayah</p> <p>a.1. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi</p> <p>a.2. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupa bumi unsur alami dan unsur buatan</p> <p>a.3. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupa bumi unsur alami dan unsur buatan</p> <p>a.4. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah</p> <p>a.5. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan</p> <p>a.6. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perhitungan luas wilayah</p> <p>b. Pengembangan dan Penataan Ebatas Antar Negara</p> <p>b.1. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum pemerintahan di wilayah perbatasan negara</p> <p>b.2. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan di daerah dan kerjasama internasional antar perbatasan</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

	3	4	5
<p>c. <b>Batas Antar Daerah Wilayah</b></p> <p>c.1. Fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah</p> <p>c.2. Fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah</p> <p>3. <b>Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat</b></p> <p>a. <b>Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja</b></p> <p>a.1. Fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja</p> <p>a.2. Standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja</p> <p>a.2.1. Fasilitas</p> <p>a.2.2. Data pengajuan DAK</p> <p>a.2.3. Koordinasi</p> <p>a.2.4. Pembinaan dan pengawasan</p> <p>a.2.5. Monitoring dan evaluasi</p> <p>b. <b>Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja</b></p> <p>b.1. Fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja</p> <p>b.2. Fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja</p> <p>e. <b>Perlindungan Masyarakat</b></p> <p>c.1. Fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat</p> <p>c.2. Fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat</p> <p>d. <b>Penyidik Pegawai Negeri Sipil</b></p> <p>d.1. Fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil</p> <p>d.2. Fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan evaluasi administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

		3	4	5
	<p>e. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia</p> <p>e.1. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia</p> <p>e.2. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi konvensi internasional</p> <p>4. Kawasan dan Pertanahan</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam</p> <p>Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumberdaya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan</p> <p>Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, laut dan udara</p> <p>c. Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas</p> <p>Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi</p> <p>d. Pertanahan dan Kawasan Khusus</p> <p>d.1. Penyelenggaraan urusan pertanahan</p> <p>d.2. Penyelesaian sengketa pertanahan</p> <p>d.3. Evaluasi penataan kawasan khusus</p> <p>e. Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan</p> <p>e.1. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan</p> <p>e.2. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan</p> <p>5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana</p> <p>a. Identifikasi Potensi Bencana</p> <p>Evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

	3	4	5
<p>b. Organisasi Sistem dan Prosedur Pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana</p> <p>b.1. Fasilitasi Database daerah rawan bencana</p> <p>b.2. Koordinasi</p> <p>b.3. Fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana</p> <p>c. Sarana dan Prasarana</p> <p>c.1. Evaluasi standarisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>c.2. Evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>d. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</p> <p>d.1. Evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran</p> <p>d.2. Evaluasi peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>D. OTONOMI DAERAH</p> <p>1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi</p> <p>a. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah</p> <p>b. Penyusunan standar pelayanan minimal</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
<p>2. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peta Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah</p> <p>3. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>a. Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah</p> <p>b. Administrasi kepala daerah dan DPRD</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>c. Penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD di bidang pemerintahan</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

	3	4	5
<p>d. Hubungan antar lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD)</p> <p>e. Asosiasi daerah</p> <p>4. Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah</p> <p>a. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>b. Kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah</p> <p>c. Pengembangan kapasitas daerah</p> <p>E. BINA PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>1. Perencanaan Pembangunan Daerah / Per Wilayah</p> <p>2. Pengembangan Wilayah</p> <p>a. Penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah</p> <p>b. Penyusunan dan pemutakhiran basis data dan informasi pengembangan wilayah</p> <p>c. Penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah</p> <p>d. Kawasan Strategis dan Andalan</p> <p>d.1. Evaluasi pengembangan data</p> <p>d.2. Pengembangan kawasan strategis dan andalan</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>c. Wilayah Tertinggal</p> <p>e.1. Penyusunan data dan pemutakhiran basis data dan data informasi pengembangan wilayah tertinggal</p> <p>e.2. Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal</p> <p>f. Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>f.1. Penyusunan masterplan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal</p> <p>f.2. Penyusunan dan pemutakhiran basis data dan informasi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>3. Fasilitas Pemetaan Ruang dan Lingkungan Hidup</p> <p>a. Pemetaan Ruang Wilayah</p> <p>a.1. Evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah</p> <p>a.2. Evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengendalian tata ruang wilayah</p> <p>a.3. Implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang</p> <p>b. Pemetaan Ruang Kawasan</p> <p>b.1. Evaluasi tata ruang kawasan</p> <p>b.2. Pembinaan tata ruang kawasan</p> <p>b.3. Implementasi</p> <p>c. Konservasi dan Rehabilitasi</p> <p>c.1. Evaluasi pelaksanaan konservasi</p> <p>c.2. Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi</p> <p>c.3. Implementasi</p> <p>d. Perencanaan dan Pemantauan Sumberdaya Air</p> <p>d.1. Evaluasi pengembangan potensi sumber daya air</p> <p>d.2. Evaluasi pemanfaatan sumber daya air</p> <p>d.3. Implementasi</p> <p>e. Pengendalian Lingkungan Hidup</p> <p>e.1. Pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup</p> <p>e.2. Analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

4. Pengembangan Ekonomi Daerah			
a. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
a.1. Identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah			
a.2. Pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah			
b. Promosi dan Investasi Daerah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
b.1. Pelaksanaan promosi ekonomi daerah			
b.2. Pelaksanaan investasi daerah			
c. Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
c.1. Pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah			
c.2. Pelaksanaan perindustrian daerah			
d. Kemitraan Usaha	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
d.1. Perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah			
d.2. Pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah			
e. Kelengkapan Ekonomi daerah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
e.1. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah			
e.2. Penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah			
5. Penataan Perkotaan			
a. Perencanaan Pengendalian Perkotaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
a.1. Evaluasi perencanaan perkotaan			
a.2. Pengendalian penataan perkotaan			
a.3. Pasilitasi			
b. Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Kota Menengah, dan Kota Kecil	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
b.1. Pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan			
b.2. Pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan			
b.3. Fasilitas			
c. Kerjasama Perkotaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
c.1. Pengendalian kerjasama perkotaan antar negara			
c.2. Pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan			
c.3. Fasilitas			

F. **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan

a. Fasilitas Pengembangan Desa dan Kelurahan

- a.1. Pelaksanaan pengembangan desa
- a.2. Pelaksanaan pengembangan kelurahan

b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

- b.1. Pembinaan administrasi pemerintahan desa
- b.2. Pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan

c. Fasilitas Permusyawaratan Desa

- c.1. Pelaksanaan penataan kelembagaan badan permusyawaratan desa
- c.2. Pelaksanaan penataan kewenangan badan permusyawaratan desa

d. Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

- d.1. Pembinaan pengelolaan keuangan desa
- d.2. Pelaksanaan pengelolaan aset desa

e. Pengembangan Kapasitas Desa

- e.1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan
- e.2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa dan masyarakat

2. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

a. Lembaga Masyarakat

- a.1. Pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa
- a.2. Pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat

b. Pembangunan Partisipatif

- b.1. Pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif
- b.2. Pelaporan kinerja pembangunan desa

1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pendataan Potensi Masyarakat               <ul style="list-style-type: none"> <li>c.1. Inventarisasi potensi masyarakat Profi desa</li> <li>c.2. Evaluasi perkembangan masyarakat</li> </ul> </li> <li>d. Pengembangan Kawasan Perdesaan               <ul style="list-style-type: none"> <li>d.1. Pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan perdesaan</li> <li>d.2. Pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan perdesaan</li> </ul> </li> <li>e. Pelatihan Masyarakat               <ul style="list-style-type: none"> <li>e.1. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat                   <ul style="list-style-type: none"> <li>e.1.1. Grand design pelatihan masyarakat</li> <li>e.1.2. Pedoman pelatihan masyarakat</li> <li>e.1.3. Fasilitas</li> <li>e.1.4. Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>e.2. Evaluasi pelatihan masyarakat                   <ul style="list-style-type: none"> <li>e.2.1. Penyelenggaraan pelatihan</li> <li>e.2.2. Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Tahun</li> <li>4 Tahun</li> <li>4 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Budaya Nusantara                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a.1. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat</li> <li>a.2. Pelaksanaan kerjasama adat istiadat</li> </ul> </li> <li>b. Pemberdayaan Perempuan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>b.1. Pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan</li> <li>b.2. Pembinaan, perlindungan hak-hak perempuan dan ketidaksiaraan gender</li> </ul> </li> <li>c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga                   <ul style="list-style-type: none"> <li>c.1. Pelaksanaan pemberdayaan keluarga</li> <li>c.2. Pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga</li> </ul> </li> <li>d. Kesejahteraan Sosial                   <ul style="list-style-type: none"> <li>d.1. Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial</li> <li>d.2. Pelaksanaan penanganan masalah sosial</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Tahun</li> <li>4 Tahun</li> <li>4 Tahun</li> <li>4 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> </ul>

	3	4	5
<p>e. Tenaga Kerja Perdesaan</p> <p>e.1. Fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan pembinaan tenaga kerja</p> <p>e.2. Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja</p> <p>4. Usaha Ekonomi Masyarakat</p> <p>a. Usaha Pertanian dan Pangan</p> <p>Pembinaan dan pengembangan usaha pertanian, agribisnis dan Lumbung Pangan</p> <p>a.1. Identifikasi data pertanian</p> <p>a.2. Fasilitasi</p> <p>a.3. Monitoring dan evaluasi</p> <p>b. Usaha Perkedirian dan Simpan Pinjam</p> <p>b.1. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam</p> <p>b.1.1. Inventarisasi lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum</p> <p>b.1.2. Inventarisasi dan pemetaan potensi desa</p> <p>b.1.3. Inventarisasi badan usaha milik desa</p> <p>b.1.4. Usaha ekonomi desa simpan pinjam</p> <p>b.1.5. Fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan</p> <p>b.1.6. Monitoring dan evaluasi</p> <p>b.2. Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam</p> <p>b.2.1. Fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan</p> <p>b.2.2. Monitoring dan evaluasi</p> <p>c. Produksi dan Pemasaran</p> <p>c.1. Pelaksanaan pengembangan informasi pasar</p> <p>c.1.1. Identifikasi produk unggulan perdesaan</p> <p>c.1.2. Fasilitasi</p> <p>c.1.3. Monitoring dan evaluasi</p> <p>c.2. Pelaksanaan diversifikasi pasar</p> <p>c.2.1. Fasilitasi pengelolaan pasar desa</p> <p>c.2.2. Fasilitasi sarana dan prasarana desa</p> <p>c.2.3. Sistem penilaian kinerja pasar desa / lomba pasar desa</p> <p>c.2.4. Monitoring dan evaluasi</p> <p>c.2.5. Data pasar desa</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

	3	4	5
<p>d. Usaha Ekonomi dan Keluarga</p> <p>d.1. Pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian</p> <p>d.1.1. Fasilitas pengembangan usaha ekonomi keluarga</p> <p>d.1.2. Monitoring dan evaluasi</p> <p>d.2. Pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil</p> <p>d.2.1. Penyusunan Modul</p> <p>d.2.2. Fasilitas</p> <p>d.2.3. Monitoring dan evaluasi</p> <p>e. Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal</p> <p>e.1. Ekonomi perdesaan</p> <p>e.1.1. Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan</p> <p>e.1.2. Fasilitas pengembangan usaha ekonomi perdesaan</p> <p>e.1.3. Monitoring dan evaluasi</p> <p>e.2. Masyarakat tertinggal</p> <p>e.2.1. Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal</p> <p>e.2.2. Fasilitas pengembangan masyarakat dan desa tertinggal</p> <p>e.2.3. Monitoring dan evaluasi</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>5. Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan</p> <p>a. Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan</p> <p>a.1. Pembinaan pengelolaan konservasi kawasan</p> <p>a.2. Pelaksanaan rehabilitasi lingkungan</p> <p>b. Fasilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan</p> <p>b.1. Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya lahan perdesaan</p> <p>b.2. Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir perdesaan</p> <p>c. Fasilitas Prasarana dan Sarana Perdesaan</p> <p>c.1. Pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan</p> <p>c.2. Pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman</p> <p>d. Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan</p> <p>d.1. Pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan</p> <p>d.2. Pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perdesaan</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

	3	4	5
<p>e. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan</p> <p>e.1. Pelaksanaan pemasyarakatan teknologi perdesaan</p> <p>e.2. Pelaksanaan kerjasama pengelalaian teknologi perdesaan</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>G. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPPL</p> <p>1. Pendaftaran Penduduk</p>			
<p>a. Identitas Penduduk</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>a.1. Fasilitas pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk</p> <p>a.2. Penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk</p> <p>a.3. Fasilitas pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan</p>			
<p>b. Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>b.1. Fasilitas pelaksanaan pindah datang penduduk WNI</p> <p>b.2. Fasilitas pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing</p> <p>b.3. Fasilitas pelaksanaan perubahan alamat</p>			
<p>c. Pindah Datang Penduduk Antar Negeri</p> <p>c.1. Fasilitas pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk Indonesia keluar Negeri dan WNI dari luar negeri</p> <p>c.2. Fasilitas pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal terbatas</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>d. Pendaftaran Penduduk Rentan</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>d.1. Fasilitas pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana</p> <p>d.2. Fasilitas pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang</p> <p>d.3. Fasilitas pelaksanaan pendataan orang terantah</p> <p>d.4. Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan</p>			
<p>e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
<p>e.1. Monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk</p> <p>e.2. Evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk</p> <p>e.3. Pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk</p>			
<p>2. Pencatatan Sipil</p>			
<p>a. Kelahiran dan Kematian</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
<p>a.1. Fasilitas pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran</p> <p>a.2. Fasilitas pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian</p> <p>a.3. Fasilitas pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian</p> <p>a.4. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian</p>			

<p>b. Perkawinan dan Perceraian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b.1. Fasilitas pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama Islam</li> <li>b.2. Fasilitas pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non Islam</li> <li>b.3. Pencatatan perkawinan dan perceraian</li> <li>b.4. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian</li> </ol> <p>c. Penguatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c.1. Pelayanan perubahan dan pembatalan akta</li> <li>c.2. Penguatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta</li> <li>c.3. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka penguatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta</li> </ol> <p>d. Pencatatan Kewarganegaraan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d.1. Pelaksanaan pelayanan pencatatan kewarganegaraan akibat kelahiran</li> <li>d.2. Pelaksanaan pelayanan pencatatan kewarganegaraan akibat non kelahiran</li> <li>d.3. Pelaksanaan pencatatan kewarganegaraan kelahiran dan non kelahiran</li> <li>d.4. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka penguatan pelayanan pencatatan kewarganegaraan</li> </ol> <p>e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>e.1. Penyusunan program dan kegiatan direktorat pencatatan sipil</li> <li>e.2. Monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil</li> <li>e.3. Evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil</li> <li>e.4. Pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil</li> </ol> <p>3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan <ol style="list-style-type: none"> <li>a.1. Perencanaan pengembangan sistem informasi kependudukan</li> <li>a.2. Pengembangan aplikasi</li> <li>a.3. Pengembangan pemanfaatan infrastruktur</li> </ol> </li> <li>b. Kelengkapan Informasi Administrasi Kependudukan <ol style="list-style-type: none"> <li>b.1. Pengembangan sistem kependudukan</li> <li>b.2. Pengembangan sumber daya manusia</li> <li>b.3. Kelengkapan informasi kependudukan</li> </ol> </li> <li>c. Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan <ol style="list-style-type: none"> <li>c.1. Pengelolaan data administrasi kependudukan</li> <li>c.2. Pemeliharaan database administrasi kependudukan</li> <li>c.3. Pengembangan database administrasi kependudukan</li> <li>c.4. Pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan</li> </ol> </li> </ol>	<p>3</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>5</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
---	---	--	--

1	2	3	4	5
	<p>d. Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>d.1. Penyajian informasi administrasi kependudukan</p> <p>d.2. Pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik</p> <p>d.3. Pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak</p> <p>e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <p>e.1. Pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah</p> <p>e.2. Kebijakan kependudukan dan pengembangan wawasan kependudukan</p> <p>e.3. Pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan</p> <p>e.4. Pelaksanaan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan</p> <p>4. Pengembangan Kebijakan Kependudukan</p> <p>a. Kuantitas Penduduk</p> <p>a.1. Pelaksanaan penyusunan analisis jumlah, struktur dan komposisi penduduk</p> <p>a.2. Pelaksanaan analisis pertumbuhan penduduk</p> <p>a.3. Kebijakan kuantitas penduduk</p> <p>b. Kualitas Penduduk</p> <p>b.1. Pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemuda</p> <p>b.2. Pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia</p> <p>b.3. Pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan kualitas penduduk</p> <p>c. Mobilitas Penduduk</p> <p>c.1. Pelaksanaan pemetaan persebaran penduduk antarwilayah</p> <p>c.2. Pelaksanaan pemetaan urbanisasi dan migrasi non permanen</p> <p>c.3. Kebijakan mobilitas penduduk</p> <p>d. Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk</p> <p>d.1. Pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan penduduk</p> <p>d.2. Pelaksanaan pengembangan sistem pemberdayaan penduduk</p> <p>d.3. Perlindungan dan pemberdayaan penduduk</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

<p>e. Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi</p> <p>e.1. Pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah</p> <p>e.2. Pengembangan wawasan kependudukan</p> <p>e.3. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan</p> <p>5. Penyerasian Kependudukan</p> <p>a. Indikator Kependudukan</p> <p>a.1. Pelaksanaan analisis indikator kependudukan</p> <p>a.2. Penyusunan indikator statis kependudukan</p> <p>a.3. Pelaksanaan penetapan pengembangan indikator kependudukan</p> <p>a.4. Penyusunan dan penetapan indikator kependudukan</p> <p>b. Proyeksi Penduduk</p> <p>b.1. Pelaksanaan analisis proyeksi penduduk</p> <p>b.2. Pelaksanaan penyusunan proyeksi penduduk</p> <p>b.3. Pelaksanaan perumusan implikasi proyeksi penduduk</p> <p>b.4. Penyusunan penetapan dan perumusan implikasi proyeksi penduduk</p> <p>c. Perencanaan Kependudukan</p> <p>c.1. Pelaksanaan perencanaan kependudukan</p> <p>c.2. Pelaksanaan penyusunan analisis dampak kependudukan</p> <p>c.3. Pelaksanaan penetapan perencanaan kependudukan</p> <p>c.4. Penyusunan dan penetapan perencanaan kependudukan</p> <p>d. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah</p> <p>d.1. Penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga Internasional</p> <p>d.2. Penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga masyarakat dan nirlaba</p> <p>d.3. Penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga usaha swasta</p> <p>d.4. Penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah</p> <p>e. Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
--	---	---	---



<p>e.3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN</p> <p>e.4. Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah</p> <p>e.5. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah</p> <p>3. Fasilitasi Dana Perimbangan</p> <p>a. Fasilitasi Dana Alokasi Umum</p> <p>a.1. Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum</p> <p>a.2. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum</p> <p>a.3. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum</p> <p>b. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus</p> <p>b.1. Koordinasi penyiapan data dasar</p> <p>b.2. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus</p> <p>b.3. Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus</p> <p>c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam</p> <p>c.1. Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p> <p>c.2. Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p> <p>c.3. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p> <p>d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya</p> <p>d.1. Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus</p> <p>d.2. Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya</p> <p>d.3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya</p> <p>e. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan</p> <p>e.1. Penyiapan sinkronisasi kebijakan dari perimbangan</p> <p>e.2. Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan</p> <p>e.3. Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan</p> <p>4. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p>a. Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p>a.1. Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah</p> <p>a.2. Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
--	---	--	---

1	2	3	4	5
	<p>b. Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>h.1 Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas <i>pengelolaan keuangan daerah</i></p> <p>h.2 Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah</p> <p>c. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>c.1 Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah</p> <p>c.2 Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah</p> <p>d. Kajian Kebijakan dan Bantuan keterangan Ahli</p> <p>d.1 Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah</p> <p>d.2 Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah</p> <p>e. Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>e.1 Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah</p> <p>e.2 Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pelaksanaan keuangan daerah</p> <p>e.3 Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

BUPATI BALANGAN,

  
H. ANSHARUDDIN